

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KOTA BATAM

Volume 6, 2023



2022



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA BATAM**

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KOTA BATAM

Volume 6, 2023

<https://batamkota.bps.go.id>

2022



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA BATAM**

**Indeks Pembangunan Manusia
Kota Batam
2022**

Volume 6, 2023

ISSN: 2798-3366

No. Publikasi: 21710.2327

Katalog: 4102002.2171

Ukuran Buku: 14,8 x 21 cm

Jumlah Halaman: x + 62 halaman

Naskah:

Badan Pusat Statistik Kota Batam

Penyunting:

Badan Pusat Statistik Kota Batam

Desain Kover:

Badan Pusat Statistik Kota Batam

Penerbit:

@Badan Pusat Statistik Kota Batam

Pencetak:

CV. Mutiara Indra Grafika

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Kota Batam

ISSN: 2798-3366

TIM PENYUSUN

Indeks Pembangunan Kota Batam 2022

Penanggung Jawab :

Aguskadaryanto

Editor:

Anditia Pratiwi

Penulis:

Maria Lisbetaria Nababan

Gambar Kulit:

Anditia Pratiwi

Batas Bab:

Anditia Pratiwi

Maria Lisbetaria Nababan



KATA PENGANTAR

Penyusunan “INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KOTA BATAM TAHUN 2022” merupakan salah satu kewajiban akhir BPS Kota Batam yang harus dibuat untuk melengkapi kumpulan publikasi pada Pelayanan Statistik Terpadu (PST) Badan Pusat Statistik Kota Batam. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyusun angka Indeks Pembangunan Manusia tahun 2022 yang akan digunakan sebagai dasar evaluasi keberhasilan pelaksanaan pembangunan sumber daya manusia, utamanya yang berkaitan dengan masalah kesehatan, pendidikan, dan kondisi ekonomi yang dilihat dari kemampuan daya beli penduduk.

Publikasi ini berisi penjelasan beberapa aspek yang berkaitan dengan IPM dan hasil perhitungan IPM Kota Batam beserta komponennya, sekaligus perbandingannya dengan kabupaten/kota lainnya di Kepulauan Riau.

Dengan selesainya publikasi “Indeks Pembangunan Manusia Kota Batam Tahun 2022” ini diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi. Segala kritik dan saran bagi penyempurnaan selanjutnya sangat diharapkan.

Batam, Desember 2023

Kepala Badan Pusat Statistik Kota Batam

Aguskadaryanto, SST

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Manfaat Indeks Pembangunan Manusia	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
BAB 2 KONSEP PEMBANGUNAN MANUSIA	7
2.1 Konsep Pembangunan Manusia	9
2.2 Indikator Pembangunan Manusia: Alat Ukur Pencapaian Pembangunan	12
2.2.1 Indikator Komposit Utama: IPM	13
2.2.2 Indikator Tunggal Pembangunan Manusia	15
BAB 3 METODOLOGI	17
3.1 Perubahan Metode IPM	19
3.1.1 Metode Lama IPM.....	20
3.1.2 Metode Baru IPM	22
3.2 Sumber Data	24
3.3 Teknik Penghitungan	25
3.4 Penilaian Kinerja	28
BAB 4 CAPAIAN PEMBANGUNAN MANUSIA	31
4.1 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kota Batam	31
4.2 Perkembangan Indikator Komponen IPM Kota Batam ..	35
4.3 Pertumbuhan IPM	40

BAB 5 UPAYA PEMBANGUNAN MANUSIA	43
5.1 Kependudukan	46
5.2 Perekonomian	47
5.2.1 Struktur Perekonomian	48
5.2.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi	51
5.2.3 PDRB per Kapita	54
5.3 Pendidikan	55
5.3.1 Sarana Pendidikan, Guru, dan Murid	56
5.3.2 Angka Partisipasi	57
5.3.3 Pendidikan yang Ditamatkan	58
5.4 Kesehatan	59
5.4.1 Sarana Kesehatan	60
5.5 Ketenagakerjaan	61

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Daftar Indikator Tunggal Pembangunan Manusia	16
Tabel 3.1 Batas Minimum dan Batas Maksimum (Sasaran) Komponen IPM Metode Lama	21
Tabel 3.2 Batas Minimum dan Batas Maksimum (Sasaran) Komponen IPM Metode Baru	24
Tabel 3.3 Konversi Lama Sekolah Berdasarkan Ijazah Terakhir	26
Tabel 3.4 Share Kelompok Komoditas terhadap Total Konsumsi	31
Tabel 4.1 Perkembangan IPM Provinsi Kepulauan Riau Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2018-2022	35
Tabel 4.2 Perkembangan Indikator Komponen IPM Kota Batam, Tahun 2018-2022	35
Tabel 4.3 Perkembangan Indeks Komponen IPM Kota Batam, Tahun 2018-2022	40
Tabel 5.1 Indikator Kependudukan Kota Batam Tahun 2022	46
Tabel 5.2 Peranan Sektor-sektor Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku di Kota Batam, Tahun 2018-2022	49
Tabel 5.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, Kota Batam: Tahun 2020-2022	50
Tabel 5.4 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha, Kota Batam: Tahun 2020-2022	52
Tabel 5.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha, Kota Batam: Tahun 2018-2022	53
Tabel 5.6 PDRB per Kapita Kota Batam Tahun 2018-2022	55
Tabel 5.7 Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Menurut Jenis Sekolah, Kota Batam: 2022	56
Tabel 5.8 Banyaknya Sarana Kesehatan Menurut Jenisnya di Kota Batam Tahun 2020 dan 2022	60
Tabel 5.9 Statistik Ketenagakerjaan Kota Batam Tahun 2020-2022	61

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Hubungan Antara Pembangunan Manusia dan Pertumbuhan Ekonomi	11
Gambar 3.1 Perkembangan Metodologi IPM	19
Gambar 3.2 Formula Penghitungan IPM Metode Lama	20
Gambar 3.3 Formula Penghitungan IPM Metode Baru	23
Gambar 3.4 Daftar Komoditas untuk Penghitungan PPP	28
Gambar 4.1 Perkembangan IPM Kota Batam (Metode Baru)	34
Gambar 4.2 Usia Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota, Kepulauan Riau: 2022	36
Gambar 4.3 Rata-rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota, Kepulauan Riau: 2022	38
Gambar 4.4 Pengeluaran Riil per Kapita Setahun yang Disesuaikan Menurut Kabupaten/Kota, Kepulauan Riau: 2022	39
Gambar 4.5 Laju Pertumbuhan IPM Kota Batam, 2018-2022	41
Gambar 5.1 Piramida Penduduk Kota Batam Tahun 2022	47
Gambar 5.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dan Nasional Tahun 2018-2022(persen)	54
Gambar 5.3 Angka Partisipasi Kasar, dan Angka Partisipasi Murni Menurut Jenjang Pendidikan, Kota Batam: 2022	58
Gambar 5.4 Distribusi Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan yang Ditamatkan, Kota Batam: 2022	59
Gambar 5.5 Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha di Kota Batam Tahun 2022	62

BAB I

PENDAHULUAN

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia



1.1 Latar Belakang

Manusia merupakan kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Sudah sepantasnya apabila manusia menjadi tujuan utama dalam pembangunan. Keberhasilan pembangunan seharusnya memang tidak hanya diukur dari tingginya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga peningkatan kualitas manusianya. Munculnya paradigma baru tersebut dipicu oleh kegagalan konsep pembangunan yang hanya menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi. Sebelum tahun 1970-an, keberhasilan pembangunan semata-mata hanya diukur dari tingkat pertumbuhan Gross National Product (GNP). Faktanya, masih kerap dijumpai negara-negara dengan tingkat pertumbuhan GNP yang tinggi, tetapi kualitas manusianya masih rendah.

Menurut UNDP, pembangunan manusia dirumuskan sebagai upaya perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging the choices of people*) dan sekaligus sebagai taraf yang dicapai dari upaya tersebut. "Perluasan pilihan" hanya mungkin dapat direalisasikan jika penduduk paling tidak memiliki: peluang berumur panjang dan sehat, pengetahuan dan keterampilan yang memadai, serta peluang untuk merealisasikan pengetahuan yang dimiliki dalam kegiatan yang produktif. Dengan kata lain, tingkat pemenuhan ketiga unsur tersebut sudah dapat merefleksikan, secara minimal, tingkat keberhasilan pembangunan manusia suatu wilayah.

Pembangunan manusia dapat dilihat dari sisi pelaku atau sasaran yang ingin dicapai. Dalam hal ini, UNDP melihat pembangunan manusia sebagai semacam model pembangunan tentang penduduk, untuk penduduk, dan oleh penduduk.

- a. Tentang penduduk: berupa investasi di bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial lainnya.
- b. Untuk Penduduk: berupa penciptaan peluang kerja melalui perluasan (pertumbuhan ekonomi dalam negeri).
- c. Oleh penduduk: berupa upaya memperkuat (*empowerment*) penduduk dalam menentukan harkat manusia melalui partisipasi dalam proses politik dan pembangunan.

Prinsip-prinsip tersebut konsisten dengan hakikat dan strategi pembangunan manusia Indonesia yang terdapat dalam amanat GBHN 1993 serta sesuai dengan tujuan nasional Indonesia yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945, yaitu "memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa", yang secara implisit juga mengandung makna pemberdayaan penduduk.

Dalam upaya pemantauan atas pencapaian pembangunan sebagaimana tersebut di atas, diperlukan suatu ukuran yang dapat menggambarkan ketiga unsur sebagai perluasan pilihan yang dicanangkan oleh UNDP. Laporan Pembangunan Manusia (Human Development Report) merupakan upaya untuk memberikan gambaran tentang pencapaian pembangunan yang dicapai oleh suatu wilayah dengan menggunakan alat ukur berupa indikator komposit IPM (Indeks Pembangunan Manusia) atau HDI (Human Development Indeks).

Tinggi rendahnya nilai IPM tidak dapat dilepaskan dari program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah. Proses desentralisasi tampaknya telah membuka potensi-potensi wilayah untuk berkembang secara aktif dan mandiri. Kompetisi antarwilayah makin dinamis sebagai ajang adu kebijakan pembangunan manusia yang efektif dan efisien. Namun, perlu disadari, perubahan atau peningkatan angka IPM tidak bisa terjadi secara instan. Pembangunan manusia merupakan sebuah proses dan tidak bisa diukur dalam waktu singkat. Berbeda dengan pembangunan ekonomi pada umumnya, hasil pembangunan pendidikan dan kesehatan tidak bisa dilihat dalam jangka pendek. Untuk itu, program-program pembangunan manusia harus dilaksanakan secara berkesinambungan dan terus dipantau pelaksanaannya sehingga lebih terarah.

1.2 Manfaat Indeks Pembangunan Manusia

Dimasukkannya konsep pembangunan manusia ke dalam kebijakan-kebijakan pembangunan sama sekali tidak berarti meninggalkan berbagai strategi pembangunan terdahulu, yang antara lain bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan absolut, dan mencegah perusakan lingkungan. Perbedaannya adalah bahwa dari sudut pandang pembangunan manusia, semua tujuan tersebut di atas diletakkan dalam kerangka untuk mencapai tujuan utama, yaitu memperluas pilihan-pilihan bagi manusia.

Konsep pembangunan manusia juga telah menarik perhatian para pembuat kebijakan di Indonesia. Dibandingkan dengan pendekatan ekonomi tradisional yang lebih memperhatikan peningkatan produksi dan produktivitas, pendekatan pembangunan manusia dianggap lebih mendekati tujuan utama pembangunan sebagaimana dikemukakan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1993, yaitu 'pembangunan manusia seutuhnya'. Indeks Pembangunan Manusia juga menyajikan ukuran kemajuan pembangunan yang lebih memadai dan lebih menyeluruh daripada ukuran tunggal pertumbuhan PDB/PDRB

per kapita.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit tunggal yang digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia yang telah dilakukan di suatu wilayah. Walaupun tidak dapat mengukur semua dimensi dari pembangunan manusia, indeks ini mampu mengukur dimensi pokok pembangunan manusia yang dinilai mencerminkan status kemampuan dasar (*basic capabilities*) penduduk. Ketiga kemampuan dasar itu adalah umur panjang dan sehat yang diukur melalui Umur Harapan Hidup waktu lahir, berpengetahuan dan berketerampilan yang diukur melalui angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup layak yang diukur dengan pengeluaran konsumsi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk).

Oleh karena IPM merupakan indikator penting dan terukur dalam menggambarkan perkembangan pembangunan manusia, seringkali IPM dijadikan sebagai salah satu indikator target pembangunan, untuk menentukan level pembangunan di suatu wilayah. Penetapan IPM sebagai target pembangunan setidaknya akan menjadi asumsi makro yang dipilih, walaupun sebenarnya belum mencakup pembangunan manusia secara menyeluruh. Namun demikian, indikator dalam IPM secara teknis dipandang mudah dipahami, valid, reliabel, dan parsimoni, serta terstandarisasi, sehingga mudah dibandingkan antarwilayah dan antarwaktu.

Satu alasan lagi akan pentingnya angka IPM, yaitu fakta bahwa IPM merupakan salah satu komponen kebutuhan fiskal daerah untuk penghitungan DAU (Dana Alokasi Umum) di samping komponen lainnya seperti jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK), dan PDRB per kapita. Dimasukkannya IPM dalam komponen kebutuhan fiskal daerah karena IPM dipandang sebagai variabel yang mencerminkan tingkat pencapaian kesejahteraan penduduk atas layanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian, makin tinggi nilai IPM suatu daerah maka besaran DAU yang akan diterima oleh daerah akan semakin turun, karena daerah dipandang sudah lebih sejahtera.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Publikasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Batam 2022 ini dimaksudkan untuk menempatkan dimensi manusia sebagai titik sentral dalam pembangunan. Dengan demikian, Kota Batam akan memiliki tolak ukur yang jelas dalam menilai pencapaian pembangunan yang dilakukan pada saat ini, terutama yang berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat Kota Batam.

1.3.2 Tujuan

1. Digunakan untuk mengetahui perkembangan keberhasilan Pemerintah Daerah Kota Batam dalam membangun kualitas hidup masyarakat;
2. Dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi Pemerintah Daerah terutama untuk perbaikan dimensi-dimensi penyusun IPM (pendidikan, kesehatan, dan kemampuan daya beli) yang masih belum maksimal;
3. Digunakan sebagai alokator DAU bagi pemerintah pusat, sehingga DAU dapat dibagikan secara merata antar daerah.

BAB II

KONSEP PEMBANGUNAN MANUSIA

1

Produktivitas

Penduduk mampu berpartisipasi penuh dalam memperoleh pendapatan

2

Pemerataan

Kesempatan yang sama dalam mengakses sumber daya ekonomi dan sosial

3

Kesinambungan

Akses sumber daya ekonomi dan sosial dipastikan sampai pada generasi mendatang

4

Pemberdayaan

Harapan dan pilihan lain masih dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat luas

2.1 Konsep Pembangunan Manusia

Konsep Pembangunan manusia yang didefinisikan oleh United Nations Development Program (UNDP) adalah suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk. Berdasarkan konsep tersebut, penduduk ditempatkan sebagai tujuan akhir, dan upaya pembangunan dipandang sebagai sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai landasan operasional pembangunan nasional Indonesia menyebutkan bahwa hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia. Dalam kerangka demikian, pembangunan nasional sesungguhnya menempatkan manusia sebagai objek (tujuan) sekaligus subjek (pelaku) pembangunan atau menempatkan manusia sebagai titik sentral.

Pembangunan manusia memiliki hakikat yang demikian luas. Namun, setidaknya ada empat hal pokok yang perlu diperhatikan untuk menjamin tercapainya pembangunan manusia, yaitu: produktivitas, pemerataan, kesinambungan, pemberdayaan (UNDP, 1995).

1. Produktivitas

Penduduk harus diupayakan untuk mampu meningkatkan produktivitas dan mampu berpartisipasi penuh dalam proses penciptaan pendapatan dan pencarian nafkah. Dengan demikian, pembangunan ekonomi merupakan bagian dari pembangunan manusia.

2. Pemerataan

Penduduk memiliki kesempatan yang sama untuk mendapat akses terhadap semua sumber daya ekonomi dan sosial. Penduduk harus dapat mengambil manfaat dari semua kesempatan yang ada dan ikut berpartisipasi dalam peningkatan kualitas hidupnya.

3. Kesinambungan

Akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial dipastikan dapat sampai pada generasi yang akan datang. Dengan demikian, setiap generasi memperbaharui semua sumber daya fisik, manusia, dan lingkungan.

4. Pemberdayaan

Harapan dan pilihan-pilihan lain masih dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat luas seperti kebebasan berpolitik, sosial, dan ekonomi, sampai pada kesempatan menjadi kreatif dan produktif. Pilihan lain yang saat ini berkembang secara global adalah kebebasan menikmati kehidupan

yang sesuai dengan harkat manusiawinya, dan tentunya jaminan adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia merupakan bagian dari paradigma tersebut. Paradigma pembangunan manusia mempunyai dua sisi, dan apabila kedua faktor tidak seimbang maka hasilnya adalah frustrasi (UNDP, 1995). Faktor pertama berupa formasi kapabilitas manusia, seperti perbaikan taraf kehidupan, kesehatan, pendidikan, dan keterampilan. Faktor lainnya adalah pemanfaatan kapabilitas untuk kegiatan yang bersifat produktif, kultural, sosial, dan politik.

Konsep pembangunan manusia dalam pengertian di atas jauh lebih luas daripada teori-teori pembangunan ekonomi yang konvensional, termasuk model pertumbuhan ekonomi, pembangunan sumber daya manusia (SDM), pendekatan kesejahteraan, dan pendekatan kebutuhan-kebutuhan dasar manusia. Model pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan peningkatan pendapatan dan produksi nasional (GNP). Pembangunan SDM menempatkan manusia terutama sebagai input dari proses produksi (sebagai suatu sarana, bukan tujuan). Pendekatan kesejahteraan melihat manusia sebagai pemanfaat (beneficiaries) bukan sebagai agen perubahan dalam pembangunan. Pendekatan kebutuhan dasar memfokuskan pada penyediaan barang dan jasa kebutuhan hidup.

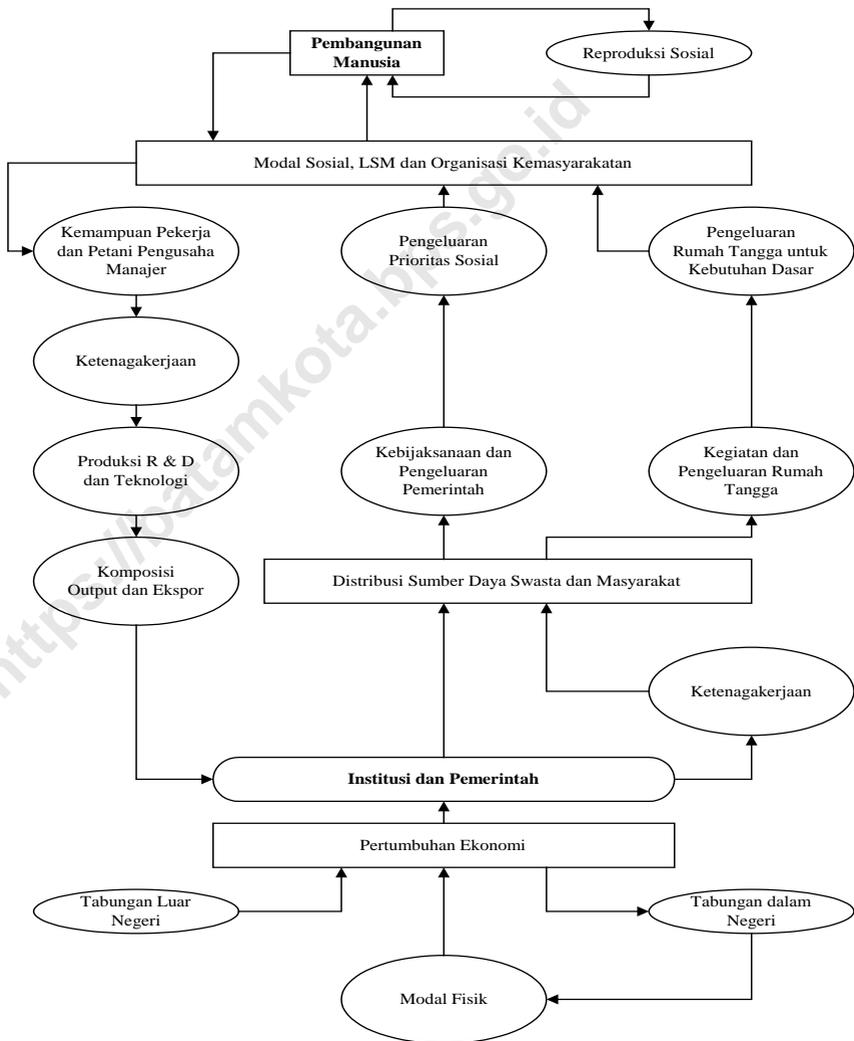
Namun demikian, pembangunan ekonomi –atau lebih tepat pertumbuhan ekonomi– merupakan prasyarat bagi tercapainya pembangunan manusia, karena dengan pembangunan ekonomi akan terjamin peningkatan produktivitas dan peningkatan pendapatan melalui penciptaan kesempatan kerja. Menurut UNDP (1996), hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi bersifat timbal balik. Sukar dibayangkan apabila ada negara yang dapat menjalankan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan tanpa pertumbuhan ekonomi yang memadai.

Akan tetapi, hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia secara empiris terbukti tidak bersifat otomatis. Artinya, banyak negara (atau daerah) yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang cepat tanpa diikuti oleh pembangunan manusia yang seimbang. Sebaliknya, banyak pula negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi pada tingkat yang sedang, tetapi terbukti dapat meningkatkan kinerja pembangunan manusia secara mengesankan. Bukti empiris ini tidak berarti bahwa pertumbuhan ekonomi tidak penting bagi pembangunan manusia. Pertumbuhan ekonomi justru merupakan sarana utama bagi pembangunan manusia, terutama pertumbuhan ekonomi yang merata secara sektoral dan kondusif terhadap penciptaan lapangan kerja. Hubungan yang tidak otomatis ini sesungguhnya merupakan

tantangan bagi pelaksana pemerintahan untuk merancang kebijakan yang mantap, sehingga hubungan keduanya saling memperkuat.

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia berlangsung melalui dua jalur (Gambar 2.1).

Gambar 2.1
Hubungan Antara Pembangunan Manusia dan Pertumbuhan Ekonomi



Sumber: UNDP (1996)

Jalur pertama melalui kebijaksanaan dan pengeluaran pemerintah. Dalam hal ini faktor yang menentukan adalah pengeluaran pemerintah untuk sub sektor sosial yang merupakan prioritas, seperti pendidikan dan kesehatan dasar. Besarnya pengeluaran itu merupakan indikasi besarnya komitmen pemerintah terhadap pembangunan manusia. Jalur kedua adalah melalui kegiatan pengeluaran rumah tangga. Dalam hal ini faktor yang menentukan adalah besar dan komposisi pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan dasar, seperti pemenuhan nutrisi anggotanya, untuk biaya pelayanan kesehatan, dan pendidikan dasar, serta untuk kegiatan lainnya yang serupa.

Selain pengeluaran pemerintah dan pengeluaran rumah tangga, hubungan antara kedua variabel itu berlangsung melalui penciptaan lapangan kerja. Aspek ini sangat penting karena sesungguhnya penciptaan lapangan kerja merupakan “jembatan utama” yang mengkaitkan antara keduanya (UNDP, 1996). Melalui upaya pembangunan manusia, kemampuan dasar dan keterampilan tenaga kerja, termasuk petani, pengusaha dan manajer, akan meningkat. Selain itu, pembangunan manusia akan mempengaruhi jenis produksi domestik, kegiatan riset, dan pengembangan teknologi, yang pada akhirnya akan mempengaruhi komposisi output dan ekspor suatu negara. Kuatnya hubungan timbal balik antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia juga dipengaruhi oleh faktor-faktor kelembagaan, pemerintah, distribusi sumber daya swasta dan masyarakat, modal sosial, LSM, dan organisasi kemasyarakatan.

Faktor-faktor kelembagaan pemerintah jelas peranannya karena keberadaannya sangat menentukan implementasi suatu kebijakan publik. Faktor distribusi sumber daya juga jelas karena tanpa distribusi sumber daya yang merata (misalnya dalam penguasaan lahan atau sumber daya ekonomi lainnya) hanya akan menimbulkan frustrasi masyarakat. Faktor modal sosial menegaskan arti penting peranan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan terhadap sistem dan perilaku pemerintahan. Semua faktor-faktor tersebut berperan sebagai semacam katalisator bagi berlangsungnya hubungan timbal balik antara keduanya secara efisien.

2.2 Indikator Pembangunan Manusia: Alat Ukur Pencapaian Pembangunan

Indikator adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status, dan memungkinkan dilakukannya pengukuran terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu.

Secara konsep, pembangunan manusia adalah upaya yang dilakukan untuk memperluas peluang penduduk untuk mencapai hidup layak, yang secara umum dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas dasar dan daya beli. Pada tataran praktis, peningkatan kapasitas dasar adalah upaya untuk meningkatkan produktivitas penduduk melalui peningkatan pengetahuan dan derajat kesehatan. Upaya ini merupakan bagian dari fungsi dan tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan fasilitas sosial-ekonomi dasar. Adapun peningkatan daya beli, ditempuh melalui pertumbuhan ekonomi sehingga tercipta perluasan kesempatan kerja. Upaya ini merupakan fungsi badan usaha swasta dengan pengaturan pemerintah untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif.

Apakah fungsi-fungsi tersebut berjalan serta seberapa besar pencapaian yang telah diperoleh dalam suatu periode, diperlukan suatu alat ukur yang dapat digunakan untuk melihat perkembangan secara menyeluruh dari upaya pembangunan manusia. Dalam hal ini dikenal dua kategori alat ukur, yaitu (i) indikator komposit suatu indeks tunggal yang mengandung banyak dimensi pemikiran dan pengukuran berbentuk IPM, IPJ, IDJ, dan IKM, serta (ii) indikator tunggal suatu nilai statistik (rata-rata, proporsi, ratio, rate) yang hanya mengandung dimensi tunggal dari fenomena yang menjadi fokus perhatian. Secara bersamaan kedua jenis indikator tersebut (tunggal dan komposit) harus digunakan secara bersamaan untuk dapat mengidentifikasi permasalahan secara lebih terarah dan spesifik.

2.2.1 Indikator Komposit Utama: IPM

Indikator komposit pembangunan manusia adalah alat ukur yang dapat digunakan untuk melihat pencapaian pembangunan manusia secara antar daerah dan antar waktu. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan alat ukur dimaksud yang menunjukkan presentase pencapaian dalam pembangunan manusia dengan memperhatikan pada tiga faktor yang paling esensial dalam kehidupan manusia, yaitu kelangsungan hidup, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Secara umum, IPM adalah rata-rata pencapaian dalam tiga faktor.

Faktor kelangsungan hidup direpresentasikan oleh indikator Umur Harapan Hidup saat lahir (Life Expectancy-e0). Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Umur Harapan Hidup mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat.

Faktor pengetahuan, kini digambarkan oleh Rata-rata Lama Sekolah (Mean Years of Schooling-MYS) dan Angka Harapan Lama

Sekolah (Expected Years of Schooling-EYS), di mana sebelumnya digambarkan oleh Rata-rata Lama Sekolah dan Angka Melek Huruf. Rata-rata lama sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Dalam kondisi normal, indikator ini diasumsikan tidak akan turun. Adapun cakupan penduduk yang dihitung adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas.

Angka harapan lama sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya diasumsikan sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Angka harapan lama sekolah dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Faktor kehidupan yang layak digambarkan oleh Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan. Pengeluaran per kapita yang disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (Purchasing Power Parity-PPP). Rata-rata pengeluaran per kapita tersebut dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012, sedangkan penghitungan paritas daya beli menggunakan 96 komoditas (66 komoditas makanan dan 30 komoditas nonmakanan).

Sebagai indikator komposit, IPM mempunyai manfaat terbatas, terutama kalau disajikan tersendiri hanya dapat menunjukkan status pembangunan manusia suatu daerah. Namun demikian, manfaat yang terbatas tersebut dapat diperluas apabila dilakukan perbandingan antarwaktu dan antardaerah, sehingga posisi relatif suatu daerah terhadap daerah yang lain dapat diketahui serta kemajuan/pencapaian antarwaktu di suatu daerah dan perbandingannya dengan pencapaian daerah lain dapat dibahas.

IPM bernilai 0-100 yang semakin tinggi menyatakan status pencapaian yang lebih tinggi. Untuk melihat capaian tersebut, IPM dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, yaitu:

1. $IPM < 60$: IPM rendah,
2. $60 \leq IPM < 70$: IPM sedang,
3. $70 \leq IPM < 80$: IPM tinggi,
4. $IPM \geq 80$: IPM sangat tinggi.

2.2.2 Indikator Tunggal Pembangunan Manusia

Permasalahan di pelbagai aspek tidak dapat digambarkan oleh indikator komposit, sehingga untuk memperoleh gambaran yang lebih spesifik dan terfokus perlu dilengkapi dengan indikator tunggal (input, proses, output, dan outcome) dari setiap aspek kehidupan maupun sektor pembangunan. Dengan indikator tunggal, besarnya permasalahan dapat diketahui, misalnya di tingkat perencanaan tentang kelompok sasaran dan investasi (indikator input), di tingkat implementasi tentang partisipasi kelompok sasaran dalam program (indikator proses), monitoring tentang hasil dan manfaat program (indikator output dan outcome). Indikator tunggal yang termasuk dalam set indikator pembangunan manusia merupakan indikator yang relevan kaitannya terhadap pencapaian pembangunan manusia, seperti yang tercermin oleh IPM, atau ukuran deprivation (keterbelakangan) manusia dalam lamanya hidup, pengetahuan, dan standar hidup layak.

Pemberdayaan merupakan salah satu isu pokok pembangunan manusia yang secara praktis meliputi (i) pertumbuhan ekonomi dengan isu strategis kesempatan kerja, (ii) peningkatan kapasitas dasar dengan isu strategis peningkatan partisipasi sekolah, peningkatan derajat kesejahteraan masyarakat, penurunan laju pertumbuhan penduduk alami, (iii) pengurangan penduduk miskin. Pelbagai indikator tunggal dapat diidentifikasi yang dapat menunjukkan adanya kemajuan dalam isu tersebut karena intervensi pemerintah. Indikator tersebut sedapat mungkin dapat digunakan untuk menunjukkan sebagai faktor-faktor penyebab yang bersifat mendasar, tidak langsung, dan langsung terhadap kemajuan atau pencapaian pembangunan manusia. Sekitar 50 indikator telah diidentifikasi yang dapat diperoleh secara berkesinambungan pada tingkat kabupaten/kota, yang sebagian di antaranya disajikan pada Tabel 2.1. Indikator tersebut dapat digunakan untuk memberikan penjelasan lebih jauh tentang pencapaian pembangunan manusia.

Tabel 2.1
Daftar Indikator Tunggal Pembangunan Manusia

No	Indikator	Jenis	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)
A Kependudukan			
1	Jumlah Penduduk	Input	SP dan Proyeksi Penduduk
2	Tingkat Pertumbuhan Penduduk Setahun	Outcome	SP dan Proyeksi Penduduk
3	Rasio Jenis Kelamin	Output	SP dan Proyeksi Penduduk
4	Angka Ketergantungan	Outcome	SP dan Proyeksi Penduduk
B Ekonomi			
5	% PDRB Sektor Pertanian, Industri, dan Jasa	Outcome	PDRB menurut Kab./Kota
6	PDRB per Kapita	Output	PDRB menurut Kab./Kota
7	Pertumbuhan PDRB per Kapita	Outcome	PDRB menurut Kab./Kota
C Pendidikan			
8	Rata-Rata Lama Sekolah	Outcome	Susenas
9	Angka Melek Huruf	Outcome	Susenas
10	Angka Partisipasi Murni (SD, SLTP, SLTA)	Output	Susenas
11	Jumlah Penduduk Usia Sekolah	Input	Dinas Pendidikan
D Kesehatan			
12	Angka Kematian Bayi	Outcome	SP, SUPAS, Proyeksi
13	% Penolong Kelahiran Tenaga Medis	Output	Susenas
14	Jumlah Puskesmas per 10.000 Penduduk	Input	Dinas Kesehatan
15	Jumlah Bidan Desa	Input	Dinas Kesehatan
E Ketenagakerjaan			
16	Partisipasi Angkatan Kerja	Output	Susenas
17	Angka Pengangguran Terbuka	Outcome	Susenas
18	% Pekerja Sektor Pertanian, Industri, Jasa	Proses	Susenas
F Kemiskinan			
19	Jumlah Penduduk Miskin	Outcome	Susenas
20	% Penduduk Miskin	Outcome	Susenas
21	% Pengeluaran untuk Makanan	Outcome	Susenas
G Perumahan			
22	% Rumah Tangga dengan Lantai Tanah	Output	Susenas
23	% Rumah Tangga dengan Air Bersih	Output	Susenas

BAB III

METODOLOGI

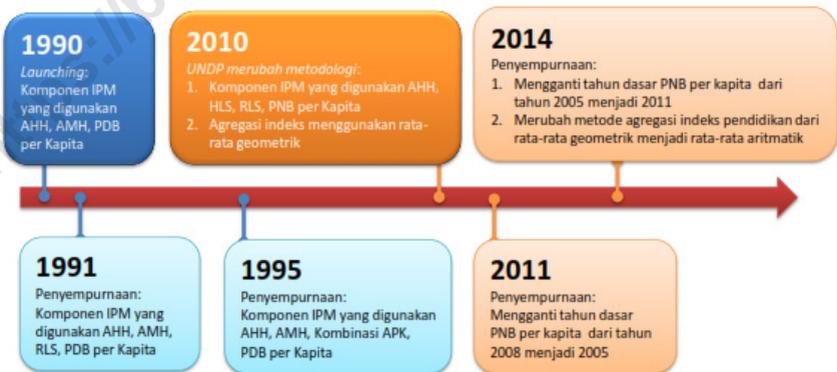


3.1 Konsep Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit yang mengakomodir dimensi kelangsungan hidup, pengetahuan, dan standar hidup layak. Ketiga dimensi tersebut direpresentasikan melalui indikator-indikatornya dengan teknik dan cara tertentu. Penghitungan IPM ini sebenarnya mengikuti konsep dasar yang dilakukan UNDP (United Nation Development Programme). Oleh karena itu, mulai tahun 2014, penghitungan IPM dilakukan menggunakan metode baru.

Penerapan penghitungan IPM dengan metode baru sudah dilakukan UNDP sejak tahun 2010. Namun, di Indonesia penghitungan IPM dengan metode baru mulai diterapkan untuk angka IPM tahun 2014. Hal ini mempertimbangkan terkait aplikasi di Indonesia dan penyempurnaan-penyempurnaan terhadap metode tersebut. Perubahan-perubahan yang terjadi tentunya mengikuti berjalannya waktu dan perkembangan zaman, di mana hal ini erat kaitannya dengan relevansi beberapa variabel dan kehandalan metode yang digunakan. Perkembangan perubahan metodologi penghitungan IPM ini pun juga tidak sekali ini dilakukan, sebagaimana dijelaskan dalam Gambar 3.1.

Gambar 3.1
Perkembangan Metodologi IPM

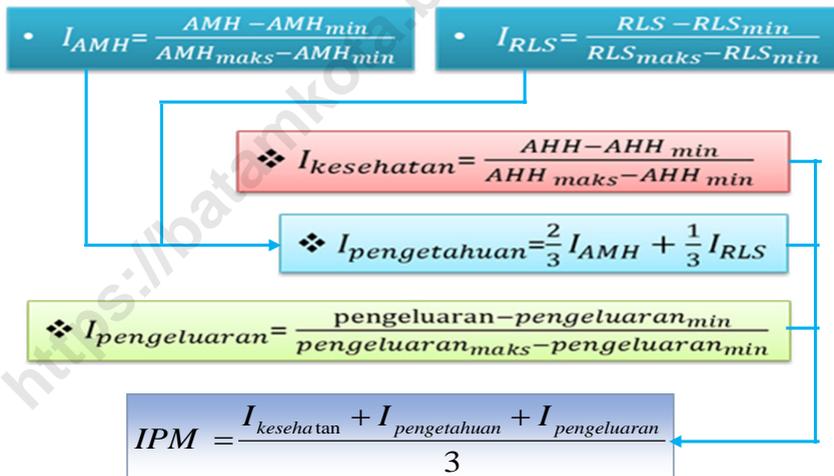


3.1.1 Metode Lama IPM

Pada prinsipnya, IPM dibangun atas dimensi kelangsungan hidup, pengetahuan, dan standar hidup layak. Dengan demikian, IPM merupakan gabungan atas indeks kesehatan, indeks pengetahuan, dan indeks pengeluaran. Setiap indeks tersebut tersusun berdasarkan indikator-indikator yang merepresentasikannya.

Pada metode lama, indeks kesehatan disusun berdasarkan Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH), indeks pengetahuan disusun atas Angka Melek Huruf (AMH) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), sedangkan indeks pengeluaran dihitung berdasarkan pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Dari indeks-indeks itulah diperoleh angka IPM. Dengan demikian, indeks-indeks tersebut dirumuskan sebagai berikut.

Gambar 3.2
Formula Penghitungan IPM Metode Lama



Adapun batas nilai maksimum dan minimum untuk setiap indikator adalah sebagaimana pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1
Batas Minimum dan Batas Maksimum (Sasaran)
Komponen IPM Metode Lama

Faktor	Komponen	Batas		Sasaran
		Maks.	Min.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kelangsungan Hidup	Umur Harapan Hidup (tahun)	85,0	25,0	60
Pengetahuan	Angka Melek Huruf (persen)	100	0	100
	Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	15	0	15
Standar Hidup Layak	Konsumsi riil per kapita (Rp)	732.720 ^{a)}	300.000 (1996) 360.000 (1999) ^{b)}	432.720

Keterangan:

- a. Proyeksi dari daya beli tertinggi yang dicapai Jakarta pada tahun 2018, setelah disesuaikan dengan formula atkinson. Proyeksi ini didasarkan pada asumsi tingkat pertumbuhan daya beli sebesar 6,5 persen per tahun selama periode 1993-2018.
- b. Sama dengan dua kali garis kemiskinan di provinsi yang memiliki tingkat konsumsi per kapita terendah pada tahun 1990 (daerah perdesaan di Sulawesi Selatan). Untuk tahun 1999, nilai minimum disesuaikan menjadi Rp 360.000,-. Penyesuaian ini dilakukan karena krisis ekonomi telah menyebabkan penurunan daya beli masyarakat secara drastis. Penambahan sebesar Rp 60.000,- didasarkan pada perbedaan antara garis kemiskinan lama dan garis kemiskinan baru yang jumlahnya Rp 5.000,- per bulan atau Rp 60.000,- per tahun.

3.1.2 Metode Baru IPM

Ketika beberapa indikator dipandang sudah tidak tepat lagi dalam penghitungan IPM, maka dimunculkan indikator baru yang menggantikan indikator lama tersebut. Demikian pula pada beberapa cara penghitungan, juga dilakukan revisi agar lebih sesuai.

Indikator Angka Melek Huruf merupakan indikator yang sudah tidak relevan lagi dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, angka melek huruf di sebagian besar daerah sudah cukup tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antardaerah dengan baik. Sebagai pengganti indikator Angka Melek Huruf yaitu indikator Angka Harapan Lama Sekolah. Dengan masuknya angka harapan lama sekolah, berarti indikator ini akan berkombinasi dengan Indikator rata-rata lama sekolah dalam menyusun indeks pengetahuan. Perpaduan ini pun dapat memberikan gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan lebih bisa menunjukkan perubahan yang terjadi.

Indikator lainnya yang dianggap tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah adalah Pendapatan Domestik Bruto (PDB) per kapita, karena pada indikator ini mencakup seluruh output yang dihasilkan daerah tersebut tanpa memandang penggunaan pendapatan tersebut oleh masyarakat setempat. Indikator yang lebih menggambarkan fenomena tersebut yaitu Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita. Melalui PNB, potret yang akurat tentang ekonomi tahunan suatu negara dapat dianalisis dan dipelajari. PNB bisa menghitung total pendapatan dari semua warga negara dalam suatu negara. Dengan demikian, PNB memberikan gambaran yang jauh lebih realistis daripada pendapatan warga negara asing di negara itu karena lebih dapat diandalkan dan bersifat permanen. Produk Nasional Bruto per kapita dapat menunjukkan daya beli konsumen individu dari suatu negara dan perkiraan kekayaan rata-rata, upah, dan distribusi kepemilikan dalam suatu masyarakat.

Dari segi penghitungan IPM, metode agregasi dari semua indeks penyusunnya juga mengalami perubahan. Metode agregasi pada metode lama menggunakan rata-rata aritmatik, sedangkan pada metode baru menggunakan rata-rata geometrik. Dengan menggunakan rata-rata geometrik dalam menyusun IPM, dapat diartikan bahwa capaian satu dimensi tidak dapat ditutupi oleh capaian di dimensi lain. Artinya, untuk mewujudkan pembangunan manusia yang baik, ketiga dimensi harus memperoleh perhatian yang sama besar karena ketiganya tingkat

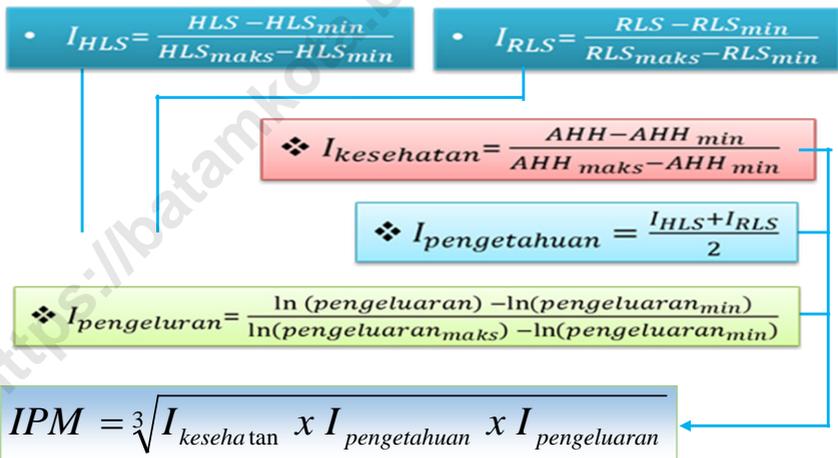
kepentingannya sama.

Berdasarkan perubahan-perubahan tersebut, dapat disimpulkan bahwasannya penghitungan IPM dengan metode baru secara garis besar adalah sebagai berikut.

- Indeks Kesehatan dihitung dari Umur Harapan Hidup.
- Indeks Pengetahuan diperoleh dari rata-rata aritmatik atas indeks rata-rata lama sekolah dan indeks harapan lama sekolah.
- Indeks Standar Hidup Layak dihitung dari pengeluaran per kapita yang disesuaikan.
- IPM dihitung atas rata-rata geometrik dari ketiga indeks tersebut (kesehatan, pengetahuan, standar hidup layak).

Jika dirumuskan, formulasinya adalah sebagai berikut.

Gambar 3.3
Formula Penghitungan IPM Metode Baru



Tabel 3.2
Batas Minimum dan Batas Maksimum (Sasaran)
Komponen IPM Metode Baru

Faktor	Komponen	Batas		Sasaran
		Maks.	Min.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kelangsungan Hidup	Umur Harapan Hidup (tahun)	85,0	20,0	65
Pengetahuan	Harapan Lama Sekolah (tahun)	18	0	18
	Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	15	0	15
Standar Hidup Layak	Pengeluaran per kapita disesuaikan (Rp)	26.572.352 ^{a)}	1.007.4362 ^{b)}	25.564.916

Keterangan:

Batas maksimum-minimum mengacu pada UNDP, kecuali indikator daya beli

- a. Daya beli minimum merupakan garis kemiskinan terendah kabupaten tahun 2010 (data empiris), yaitu di Tolikara, Papua.
- b. Daya beli maksimum merupakan nilai tertinggi kabupaten yang diproyeksikan hingga 2025 (akhir RPJPN), yaitu perkiraan pengeluaran per kapita Jakarta Selatan tahun 2025.

3.2 Sumber Data

Angka IPM merupakan indeks komposit yang melibatkan beberapa indikator. Maka dari itu, dalam penghitungannya memerlukan data dari beberapa sumber pula.

Indikator Umur Harapan Hidup bersumber dari data Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional), yaitu dengan menggunakan variabel anak lahir hidup dan anak masih hidup, yang selanjutnya dihitung secara tidak langsung dengan paket program Mortpak.

Indikator pada dimensi pengetahuan, yaitu Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah, juga menggunakan data Susenas. Harapan lama sekolah menggunakan variabel partisipasi sekolah menurut kelompok umur yang dikoreksi dengan data siswa yang bersekolah di pesantren dari Direktorat Pendidikan Islam. Untuk indikator rata-rata lama sekolah, mengkombinasikan variabel partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang pernah diduduki, kelas yang sedang dijalani, dan jenjang pendidikan yang ditamatkan.

Sumber data untuk indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan meliputi data Susenas Modul Konsumsi, serta data IHK (Indeks Harga Konsumen). Data IHK digunakan untuk menjadikan pengeluaran per kapita menjadi harga konstan dan berfungsi dalam penghitungan paritas daya beli (Purchasing Power Parity-PPP).

3.3 Teknik Perhitungan

Umur Harapan Hidup

- Umur Harapan Hidup dihitung dengan menggunakan paket program MORTPACK (metode Trussel dengan model West), dengan input Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH).

Harapan Lama Sekolah

- Menghitung jumlah penduduk menurut umur (7 tahun ke atas).
- Menghitung jumlah penduduk yang masih bersekolah menurut umur (7 tahun ke atas).
- Menghitung rasio penduduk yang masih sekolah terhadap jumlah penduduk menurut umur (7 tahun ke atas). Langkah ini menghasilkan partisipasi sekolah menurut umur.
- Menjumlahkan semua partisipasi sekolah menurut umur, sehingga diperoleh Harapan Lama Sekolah belum terkoreksi
- Menghitung faktor koreksi pesantren, yaitu membagi jumlah santri sekolah dan mukim dengan jumlah penduduk umur 7 tahun ke atas, kemudian hasilnya ditambah 1
- Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) diperoleh dengan mengalikan Angka Harapan Sekolah belum terkoreksi dengan Faktor Koreksi Pesantren

$$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$$

Keterangan:

HLS_a^t : Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t

E_i^t : Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t

P_i^t : Jumlah penduduk usia i pada tahun t

i : Usia (a, a+1, ..., n)

$$\text{Faktor Koreksi} = \frac{\text{Jumlah santri sekolah dan mukim}}{\text{Jumlah penduduk umur 7 tahun ke atas}} + 1$$

Jumlah santri sekolah dan mukim = rasio santri mukim x jumlah santri sekolah

$$\text{Rasio Santri Mukim} = \frac{\text{Jumlah santri mukim}}{\text{Jumlah santri seluruhnya}} + 1$$

Rata-rata Lama Sekolah

- i. Menyeleksi penduduk pada usia 25 tahun ke atas.
- ii. Menghitung lamanya sekolah
 - Jika partisipasi sekolah yaitu tidak/belum pernah bersekolah, maka lama sekolah = 0.
 - Jika partisipasi sekolah yaitu masih bersekolah di SD s.d. S1, maka:
 - lama sekolah = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir - 1
 - Jika partisipasi sekolah yaitu masih bersekolah S2 atau S3, maka:
 - lama sekolah = konversi ijazah terakhir + 1
 - Jika partisipasi sekolah yaitu tidak bersekolah lagi, tetapi tidak tamat di kelas terakhir, maka:
 - lama sekolah = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir - 1
 - Jika partisipasi sekolah yaitu tidak bersekolah lagi dan tamat pada jenjang tertentu, maka:
 - lama sekolah = konversi ijazah terakhir

Tabel 3.3

Konversi Lama Sekolah Berdasarkan Ijazah Terakhir

Ijazah	Konversi Tahun Lama Sekolah (Thn)
(1)	(2)
Tidak punya ijazah	0
SD/SDLB/MI/Paket A	6
SMP/SMPLB/MTs/Paket B	9
SMA/SMLB/MA/SMK/Paket C	12
D1/D2	14
D3/Sarjana Muda	15
D4/S1	16
S2/S3	18

iii. Menghitung rata-rata lama sekolah

$$RLS = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \text{lama sekolah penduduk}_i$$

RLS : Rata-rata lama sekolah
 Lama sekolah penduduk $_i$: lama sekolah penduduk ke- i
 n : jumlah penduduk ($i = 1, 2, 3, \dots, n$)

Pengeluaran per Kapita Disesuaikan

i. Menghitung rata-rata pengeluaran per kapita.

- Menghitung pengeluaran per kapita (per anggota rumah tangga) untuk setiap rumah tangga.
- Menghitung rata-rata pengeluaran per kapita untuk setiap provinsi atau kabupaten/kota.
- Menghitung rata-rata pengeluaran per kapita per tahun dalam ribuan (Y^t) = rata-rata pengeluaran per kapita per bulan $\times 12/1000$.

ii. Menghitung rata-rata pengeluaran per kapita dalam harga konstan.

$$Y_t^* = \frac{Y^t}{IHK_{(t,2012)}} \times 100$$

Y^*t : Rata-rata pengeluaran per kapita per tahun atas dasar harga konstan 2012

Y^t : Rata-rata pengeluaran per kapita per tahun pada tahun t

$IHK_{(t,2012)}$: IHK tahun t dengan tahun dasar 2012

iii. Menghitung Paritas Daya Beli/Purchasing Power Parity (PPP).

- Menghitung harga rata-rata komoditas terpilih.

$$P_i = \frac{V_i}{Q_i}$$

Keterangan:

- P_i = Rata-rata harga komoditi i per satu satuan di suatu wilayah
- V_i = Total value (biaya) yang dikeluarkan untuk komoditi i di suatu wilayah
- Q_i = Total kuantum dari komoditi i yang dikonsumsi di suatu wilayah

Untuk harga yang tidak terdapat pada Susenas Modul Konsumsi, harga diperoleh dari IHK

- Menghitung paritas daya beli.

$$\text{Paritas Daya Beli}_j = \prod_{i=1}^m \left(\frac{p_{ij}}{p_{ik}} \right)^{1/m}$$

p_{ij} : harga komoditas i di Jakarta Selatan

p_{ik} : harga komoditas i di kab/kota j

m : jumlah komoditas

Gambar 3.4
Daftar Komoditas untuk Penghitungan PPP

Makanan	Beras	Pepaya	Nonmakanan
	Tepung terigu	Minyak kelapa	
	Ketela pohon/singkong	Minyak goreng lainnya	
	Kentang	Kelapa	
	Tongkol/tuna/cakalang	Gula pasir	
	Kembung	Teh	
	Bandeng	Kopi	
	Mujair	Garam	
	Mas	Kecap	
	Lele	Penyedap masakan/vetsin	
	Ikan segar lainnya	Mie instan	
	Daging sapi	Roti manis/roti lainnya	
	Daging ayam ras	Kue kering	
	Daging ayam kampung	Kue basah	
	Telur ayam ras	Makanan gorengan	
	Susu kental manis	Gado-gado/ketoprak	
	Susu bubuk	Nasi campur/rames	
	Susu bubuk bayi	Nasi goreng	
	Bayam	Nasi putih	
	Kangkung	Lontong/ketupat sayur	
	Kacang panjang	Soto/gule/sop/fawon/cincang	
	Bawang merah	Sate/tongseng	
	Bawang putih	Mie bakso/mie rebus/mie goreng	
	Cabe merah	Makanan ringan anak	
	Cabe rawit	ikang (goreng/bakar dll)	
	Tahu	Ayam/daging (goreng dll)	
	Tempe	Makanan jadi lainnya	
	Jeruk	Air kemasan galon	
	Mangga	Minuman jadi lainnya	
	Salak	Es lainnya	
Pisang ambon	Roko kretek filter		
Pisang raja	Rokok kretek tanpa filter		
Pisang lainnya	Rokok putih		
	Rumah sendiri/bebas sewa		
	Rumah kontrak		
	Rumah sewa		
	Rumah dinas		
	Listrik		
	Air PAM		
	LPG		
	Minyak tanah		
	Lainnya(batu baterai,aki,korek,obat nyamuk dll)		
	Perlengkapan mandi		
	Barang kecantikan		
	Perawatan kulit,muka,kuku,rambut		
	Sabun cuci		
	Biaya RS Pemerintah		
	Biaya RS Swasta		
	Puskesmas/pustu		
	Praktek dokter/poliklinik		
	SPP		
	Bensin		
	Transportasi/pengangkutan umum		
	Pos dan Telekomunikasi		
	Pakaian jadi laki-laki dewasa		
	Pakaian jadi perempuan dewasa		
	Pakaian jadi anak-anak		
	Alas kaki		
	Minyak Pelumas		
	Meubelair		
	Peralatan Rumah Tangga		
	Perlengkapan perabot rumah tangga		
	Alat-alat Dapur/Makan		

iv. Menghitung pengeluaran per kapita disesuaikan.

$$Y_t^{**} = \frac{Y_t^*}{\text{Paritas Daya Beli}}$$

Y_t^{**} : Rata-rata pengeluaran per kapita disesuaikan

Y_t^* : Rata-rata pengeluaran per kapita per tahun atas dasar harga konstan 2012

3.4 Penilaian Kinerja

Dalam melakukan evaluasi kinerja pembangunan, perlu dipahami bahwa pencapaian atau hasil pembangunan merupakan

kerja kolektif seluruh pelaku pembangunan, yaitu pemerintah, badan usaha swasta, organisasi massa, LSM, serta penduduk sendiri. Oleh karena itu, mengevaluasi kinerja pembangunan tidak serta merta dapat menunjukkan pencapaian oleh pemerintah atau birokrasi semata. Namun demikian, karena peranan birokrasi pemerintahan yang sangat besar terutama dalam kedudukan dan fungsinya sebagai penyelenggara negara atau kewilayahan, maka hasil evaluasi tersebut sebagian besar dapat dialamatkan kepada pemerintah.

Untuk melihat dan mengukur kecepatan perkembangan IPM dalam suatu kurun waktu, digunakan ukuran pertumbuhan IPM per tahun. Pertumbuhan IPM menunjukkan perbandingan antara capaian yang telah ditempuh dengan capaian sebelumnya. Semakin tinggi nilai pertumbuhan, semakin cepat IPM suatu wilayah untuk mencapai nilai maksimalnya.

<https://batamkota.bps.go.id>



CAPAIAN PEMBANGUNAN MANUSIA



UHH 73,62 TAHUN

**HLS
13,32 TAHUN**



RLS 11,17 TAHUN



PENGELUARAN

pengeluaran riil per kapita dalam setahun di Kota
Batam mencapai 18,506 juta rupiah

IPM Kabupaten/
Kota di Provinsi
Kepri tahun 2022



Kota Batam bisa dikatakan sebagai jantungnya Provinsi Kepulauan Riau. Pernyataan ini tidak berlebihan jika melihat fakta dan realita yang ada. Dari sisi sosio demografi, sekitar 58,23 persen penduduk Kepulauan Riau tinggal di Kota Batam, dengan berbagai latar belakang dan kultur yang beragam. Demikian pula dari aspek ekonomi, Kota Batam juga menjadi pusat kegiatan ekonomi di Kepulauan Riau. Sektor industri yang menjadi poros perekonomian utama menjadi daya tarik tersendiri. Posisi geografis yang strategis berdekatan dengan negara tetangga menjadikan Kota Batam sebagai pintu masuk ketiga terbesar bagi wisatawan mancanegara. Dari kedua faktor itu pula yang mengantarkan tumbuhnya sektor-sektor ekonomi lainnya.

Dengan keadaan dan potensi yang demikian, membuat Provinsi Kepulauan Riau sangat bergantung pada keadaan pembangunan di Kota Batam, baik pembangunan ekonomi maupun pembangunan manusianya. Sedikit perubahan terjadi di Batam, akan memberikan dampak yang signifikan terhadap keadaan Kepulauan Riau. Dengan demikian, permasalahan sosial ekonomi di Batam akan menjadi permasalahan bagi perkembangan Kepulauan Riau.

Pada sisi pembangunan manusia, peranan Kota Batam sangat menentukan pencapaian untuk Kepulauan Riau. Untuk itu, gambaran pencapaian pembangunan manusia di Kota Batam akan sangat penting untuk dicermati.

4.1 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kota Batam

Status pembangunan manusia Kota Batam, secara umum dapat digambarkan dari pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Batam. Indikator inilah yang saat ini masih dapat menjadi ukuran perkembangan pembangunan manusia, yang menggabungkan kualitas pembangunan manusia dari segi kesehatan, pendidikan, dan daya belinya. Dampak dari pembangunan manusia itu sendiri akan memberikan nilai IPM yang selalu meningkat. Nilai IPM dan peningkatannya antar daerah akan memperlihatkan sejauh mana status pembangunan manusia antar daerah, yang dalam hal ini kabupaten/kota dalam provinsi.

IPM Kota Batam pada tahun 2010 sebesar 76,98 dan terakhir pada tahun 2022 IPM Kota Batam mencapai 81,67. Capaian IPM dengan metode baru menunjukkan peningkatan yang lebih signifikan. Artinya, perubahan beberapa indikator dan metode agregasi ternyata lebih bisa menunjukkan upaya yang telah dilakukan dalam pembangunan manusia di daerah. Terlepas dari perubahan metode, capaian IPM Kota Batam pada tahun 2022 tergolong pada kategori sangat tinggi. Hal ini

menunjukkan upaya yang serius dari Pemerintah Kota Batam dalam pembangunan manusia. Perkembangan IPM Kota Batam dari tahun ke tahun disajikan pada Gambar 4.1.

Gambar 4.1
Perkembangan IPM Kota Batam
(Metode Baru)



Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kepulauan Riau, IPM Kota Batam selalu menduduki peringkat pertama. IPM kabupaten/kota lainnya di Kepulauan Riau yang nilainya berada di atas IPM Provinsi Kepulauan Riau hanya Kota Tanjungpinang. Dapat dikatakan bahwa IPM Provinsi Kepulauan Riau banyak didongkrak oleh pencapaian IPM di Kota Batam.

IPM Kota Batam dalam 5 (lima) tahun terakhir nilainya selalu di atas angka 80, jauh di atas IPM kabupaten/kota lain di Kepulauan Riau. Capaian ini tentu masih harus terus ditingkatkan untuk mewujudkan pembangunan manusia yang makin berkualitas.

Tabel 4.1
Perkembangan IPM Provinsi Kepulauan Riau
Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2018 - 2022

Kabupaten/Kota	IPM				
	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01. Karimun	70,56	71,10	71,44	71,70	72,65
02. Bintan	73,41	73,98	74,13	74,57	74,99
03. Natuna	72,10	72,63	72,72	73,09	73,47
04. Lingga	64,06	64,98	65,29	65,83	66,57
05. Kep. Anambas	67,53	68,48	68,80	69,23	69,61
71. BATAM	80,54	81,09	81,11	81,12	81,67
72. Tanjungpinang	78,33	78,73	78,91	78,93	79,64
Provinsi KEPRI	74,84	75,48	75,59	75,79	76,46

Sumber: BPS Kota Batam

4.2 Perkembangan Indikator Komponen IPM Kota Batam

IPM adalah indeks komposit yang memadukan ukuran usia harapan hidup, tingkat pendidikan, dan pendapatan suatu daerah dalam satu angka tunggal. Dengan kata lain, IPM merupakan indeks yang mengukur pencapaian keseluruhan pembangunan non fisik suatu daerah yang dipresentasikan oleh tiga dimensi, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kualitas hidup yang layak. Upaya yang mengarah kepada peningkatan kualitas hidup manusia dilaksanakan seiring dengan peningkatan indikator-indikator sosial yang berkaitan dengan pembangunan manusia.

Tabel 4.2
Perkembangan Indikator Komponen IPM Kota Batam, Tahun 2018-2022

Tahun	Usia Harapan Hidup (Tahun)	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	Konsumsi Riil per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2018	73,24	12,95	11,12	17.560
2019	73,29	13,15	11,13	18.146
2020	73,33	13,16	11,14	18.095
2021	73,36	13,17	11,15	18.034
2022	73,62	13,32	11,17	18.506

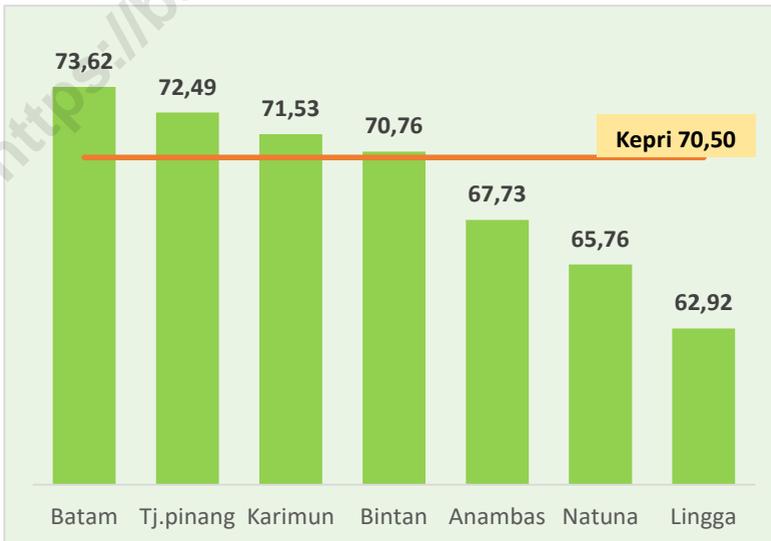
Sumber: BPS Kota Batam

Representasi dari dimensi umur yang panjang adalah usia harapan hidup. Usia harapan hidup menggambarkan seberapa lama peluang seseorang untuk bertahan hidup dari pertama kali dilahirkan. Semakin tinggi indikator harapan hidup mencerminkan semakin tingginya derajat kesehatan di suatu daerah karena seseorang yang hidupnya panjang cenderung didukung dengan kondisi kesehatan yang baik.

Perkembangan usia harapan hidup Kota Batam dalam lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang pelan, tetapi pasti. Dari usia harapan hidup sebesar 73,24 tahun pada tahun 2018, kini telah mencapai 73,62 tahun pada tahun 2022. Itu artinya bayi yang lahir pada tahun 2022 akan hidup hingga mencapai usia 73,62 tahun. Lambatnya kenaikan usia harapan hidup ini menggambarkan bahwa memang tidak mudah untuk menaikkan indikator ini dalam kurun waktu satu tahun. Diperlukan upaya yang keras di bidang kesehatan secara menyeluruh untuk meningkatkan Usia Harapan Hidup, apalagi jika angka yang dicapainya sudah tinggi.

Usia harapan hidup di Kota Batam merupakan yang tertinggi di Kepulauan Riau. Usia harapan hidup Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022 adalah sebesar 70,50 tahun, dan kabupaten/kota yang usia harapan hidupnya di atasnya adalah Kota Batam, Kota Tanjungpinang, Kabupaten Karimun, dan Kabupaten Bintan.

Gambar 4.2
Usia Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota, Kepulauan Riau (Tahun), 2022



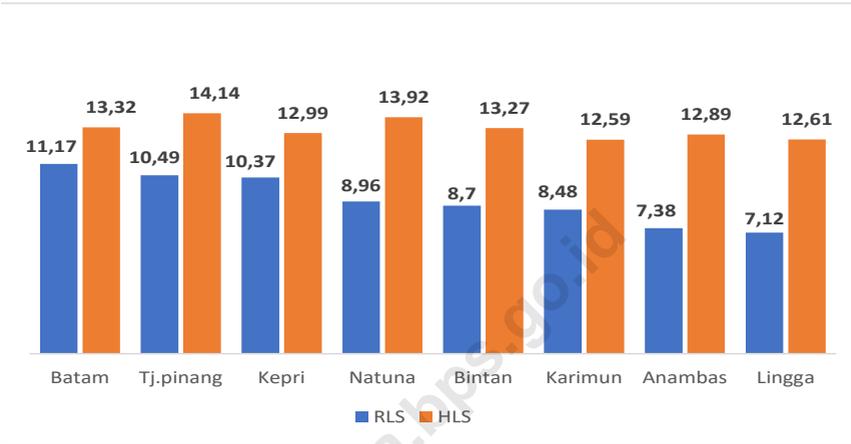
Sementara itu, dimensi pengetahuan diukur dengan indikator angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Angka harapan lama sekolah menunjukkan berapa tahun lamanya penduduk usia 7 tahun ke atas akan dapat menyelesaikan sekolahnya, sedangkan rata-rata lama sekolah menunjukkan berapa tahun penduduk 25 tahun ke atas rata-rata menduduki bangku sekolah. Angka harapan lama sekolah berkembang dengan lambat, tetapi masih menunjukkan peningkatan yang cukup berarti dalam kurun lima tahun terakhir. Pada tahun 2018, angka harapan lama sekolah sebesar 12,95 tahun dan kini (2022) sudah mencapai 13,32 tahun. Artinya, anak-anak yang tadinya diharapkan bisa bersekolah hingga kelas 3 SLTA, kini sudah bisa diharapkan bersekolah hingga tingkat 1 di perguruan tinggi.

Adapun rata-rata lama sekolah lebih lambat lagi perkembangannya, bahkan cenderung stagnan. Pada tahun 2018 rata-rata lama sekolah di Kota Batam 11,12 tahun. Sementara itu, di tahun 2022 rata-rata lama sekolah hanya mencapai 11,17. Hal ini berarti bahwa rata-rata lama sekolah penduduk Batam hanya sampai kelas 2 SLTA. Sulitnya menggeser angka rata-rata lama sekolah ini disebabkan penduduk yang tidak bersekolah lagi cenderung akan tetap seperti itu dan akan terus diperhitungkan selama penduduk itu masih ada. Dengan demikian, perbaikan angka rata-rata lama sekolah lebih banyak dipengaruhi oleh generasi-generasi yang baru menyelesaikan masa studinya, di mana proporsinya mungkin lebih sedikit.

Untuk level Kepulauan Riau, angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah di Kota Batam juga berada di atas angka provinsi (Gambar 4.3). Angka harapan lama sekolah, meskipun bukan yang tertinggi di Kepulauan Riau, nilainya masih sedikit di atas angka provinsi, dan berada di bawah angka harapan lama sekolah Tanjungpinang, Natuna dan Bintan. Adapun rata-rata lama sekolah, Kota Batam masih yang tertinggi di Kepulauan Riau, bersama Kota Tanjungpinang nilainya berada di atas angka provinsi yang sebesar 10,37 tahun.

Gambar 4.3

Rata-rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Lama Sekolah Menurut Kabupaten/ Kota, Kepulauan Riau: 2022



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau

Indikator komponen IPM lainnya yaitu pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan. Indikator ini memberikan gambaran mengenai keadaan perekonomian penduduk. Dalam konteks ini, satu rupiah di Batam akan memiliki daya beli yang sama dengan satu rupiah di Jakarta. Pada tahun 2022, pengeluaran riil per kapita dalam setahun di Kota Batam mencapai 18,506 juta rupiah. Jika dibandingkan dengan keadaan tahun sebelumnya, terdapat peningkatan yaitu sekitar 472 ribu rupiah (di tahun 2018, pengeluaran riil perkapita Batam 17,560 juta rupiah).

Peningkatan pengeluaran perkapita yang terjadi di tahun 2022 disebabkan karena adanya perbaikan ekonomi pasca pandemi covid 19. Sementara itu, jika dibandingkan dengan kondisi lima tahun yang lalu, peningkatannya sekitar 946 ribu rupiah. Hal ini mengindikasikan bahwa perekonomian penduduk semakin membaik yang ditandai dengan meningkatnya daya beli

Pengeluaran riil per kapita Kota Batam yang disesuaikan juga merupakan yang paling tinggi di Kepulauan Riau (Gambar 4.4). Bahkan selisih dengan yang tertinggi berikutnya masih sekitar lebih dari 2,642 jutaan. Hal ini menandakan bahwa kehidupan masyarakat Batam jauh lebih baik dan sejahtera dibandingkan masyarakat lainnya di Kepulauan Riau.

Gambar 4.4
Pengeluaran Riil per Kapita Setahun yang Disesuaikan
Menurut Kabupaten/Kota, Kepulauan Riau: 2022 (Ribu Rupiah)



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau

Sebelum menjadi angka IPM, indikator-indikator komponen IPM tersebut di atas dikonversi terlebih dahulu menjadi indeks komponen IPM (Tabel 4.2). Dengan diterjemahkannya dalam indeks, posisi setiap dimensi komponen IPM akan lebih jelas terlihat karena skalanya sama, yaitu dari 0 hingga 100. Kondisi terakhir (tahun 2022) menunjukkan bahwa indeks yang paling tinggi adalah indeks pengeluaran, yaitu sebesar 88,95 persen, sedangkan indeks kesehatan berada di posisi 82,49 persen. Indeks yang masih berada pada kisaran 70-an persen adalah indeks pengetahuan, yaitu sebesar 74,23 persen. Hal ini berarti bahwa komponen yang paling besar kontribusinya dalam menyusun angka IPM adalah komponen pengeluaran, sedangkan komponen yang masih memiliki potensi lebih besar untuk meningkat yaitu komponen pengetahuan.

Tabel 4.3
Perkembangan Indeks Komponen IPM Kota Batam,
Tahun 2018-2022

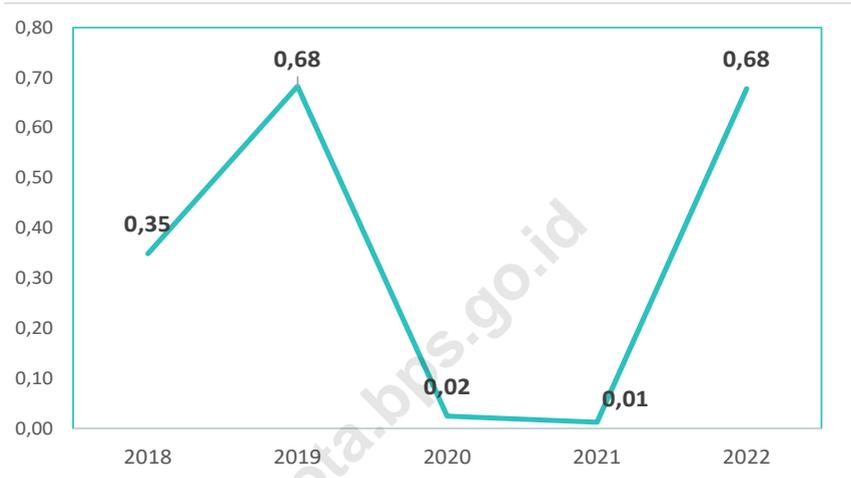
Tahun	Indeks Kesehatan	Indeks Pengetahuan	Indeks Pengeluaran	IPM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2018	81,91	73,04	87,34	80,54
2019	81,98	73,63	88,35	81,09
2020	82,05	73,69	88,26	81,11
2021	82,09	73,75	88,16	81,12
2022	82,49	74,23	88,95	81,67

Sumber: BPS Kota Batam

4.3 Pertumbuhan IPM

Dalam menganalisis IPM, sangat penting untuk mempertimbangkan laju atau percepatan kemajuan suatu daerah apabila dibandingkan dengan daerah lainnya. Persentase percepatan pembangunan manusia suatu daerah untuk mencapai angka IPM ideal dikenal sebagai pertumbuhan IPM. Pertumbuhan IPM dapat digunakan untuk melihat sejauh mana tingkat percepatan kemajuan pembangunan manusia di suatu daerah. Selama pertumbuhan IPM positif, berarti terdapat kenaikan nilai IPM. Semakin besar pertumbuhannya, semakin cepat upaya peningkatannya. Jika angka pertumbuhan IPM lebih rendah dari tahun sebelumnya, berarti terjadi perlambatan dalam upaya peningkatan pembangunan manusia. Dengan demikian, ukuran keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan pembangunan manusia pada suatu kurun waktu tidak sekedar dilihat dari posisi nilai IPM-nya, tetapi lebih tepat dilihat dari pertumbuhannya pada kurun waktu tersebut.

Gambar 4.5
Laju Pertumbuhan IPM Kota Batam,
Tahun 2018-2022 (Persen)



Sumber: BPS Kota Batam

Dari Gambar 4.5 diatas, menggambarkan bahwa pertumbuhan IPM Kota Batam menunjukkan pertumbuhan yang positif dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kemajuan pembangunan manusia di Kota Batam dari tahun ke tahun. IPM Kota Batam mengalami percepatan pertumbuhan dari tahun 2018 ke 2019. Namun pada tahun 2020 dan 2021, pertumbuhan IPM Kota Batam mengalami perlambatan. Hal ini dikarenakan pandemi Covid 19 yang sangat mempengaruhi daya beli masyarakat sehingga mengakibatkan adanya penurunan pada dimensi ekonomi. Pada tahun 2022, IPM Kota Batam tumbuh 0,68 persen.

UPAYA PEMBANGUNAN MANUSIA

Jumlah sekolah di Kota
Batam Tahun 2022



Perguruan Tinggi

14,45

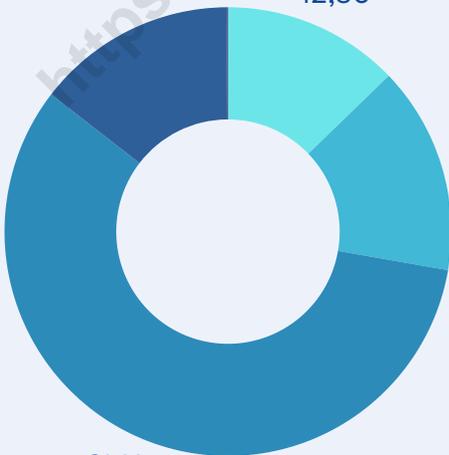
SD

12,80

SMP
14,98

Distribusi Persentase Penduduk
Usia 15 Tahun ke Atas
Menurut Pendidikan yang
Ditamatkan

SMA
57,77



Pembangunan merupakan manifestasi dari aspirasi dan tujuan suatu bangsa yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan secara struktural melalui upaya yang sistematis. Sasaran dari pembangunan pada akhirnya adalah penguasaan atas sumber daya (pendapatan untuk hidup layak), peningkatan derajat kesehatan (usia hidup panjang dan sehat), dan meningkatkan pendidikan (kemampuan baca tulis dan keterampilan untuk dapat berpartisipasi dalam masyarakat dan kegiatan ekonomi). Pembangunan manusia merupakan paradigma pembangunan yang menempatkan manusia (penduduk) sebagai fokus dan sasaran akhir dari seluruh kegiatan pembangunan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit tunggal yang digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia yang telah dilakukan di suatu wilayah. Walaupun tidak dapat mengukur semua dimensi dari pembangunan manusia, indikator ini mampu mengukur dimensi pokok pembangunan manusia yang dinilai mencerminkan status kemampuan dasar (*basic capability*) penduduk. Ketiga kemampuan dasar itu adalah umur panjang dan sehat yang diukur melalui Umur Harapan Hidup waktu lahir, berpengetahuan dan berketerampilan yang diukur melalui harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup layak yang diukur dengan pengeluaran konsumsi per kapita yang disesuaikan dalam setahun.

Oleh karena itu, pemanfaatan IPM dalam perencanaan pembangunan daerah harus dilengkapi oleh kajian dan analisis situasi terhadap indikator-indikator yang mempengaruhi ketiga komponen tersebut, baik langsung maupun tidak langsung. Analisis situasi dilakukan melalui suatu pendekatan logis untuk menentukan indikator-indikator yang mempengaruhi perkembangan nilai IPM.

Bab ini khusus membahas tentang aspek kemajuan dari indikator-indikator yang mempengaruhi terhadap besaran ketiga komponen IPM. Dalam hal ini, pengaruh-pengaruh tersebut tercermin dalam indikator tunggal pembangunan manusia, yang meliputi indikator-indikator di bidang kependudukan, ekonomi, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kemiskinan, dan perumahan.

5.1 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kota Batam

Aspek penduduk menjadi penting dalam konteks pembangunan manusia karena penduduk inilah yang menjadi target dalam pembangunan manusia. Bahkan dalam berbagai bidang pembangunan, faktor penduduk selalu diperhitungkan baik sebagai objek pembangunan maupun sebagai subjek pembangunan. Maka dari itu, perkembangan jumlah penduduk beserta beberapa ukuran yang mengikutinya sangat penting untuk diamati, sehingga upaya pembangunan manusia yang dilakukan dapat dipahami sebagai bagian dari upaya terhadap beberapa ukuran kependudukan yang ada.

Penduduk Provinsi Kepulauan Riau sebagian besar terkonsentrasi di Kota Batam. Sekitar 58,23 persen penduduk Provinsi Kepulauan Riau berada di Kota Batam. Kegiatan perekonomian yang banyak terpusat di Kota Batam menjadi penyebab banyaknya penduduk yang tinggal di Batam. Hal ini juga ditandai dengan tingginya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kota Batam pada tahun 2022 yang mencapai 3,10 persen. Hingga tahun 2022, jumlah penduduk Batam mencapai 1.269.413 jiwa, yang terdiri atas 646.639 orang penduduk laki-laki dan 622.774 orang penduduk perempuan.

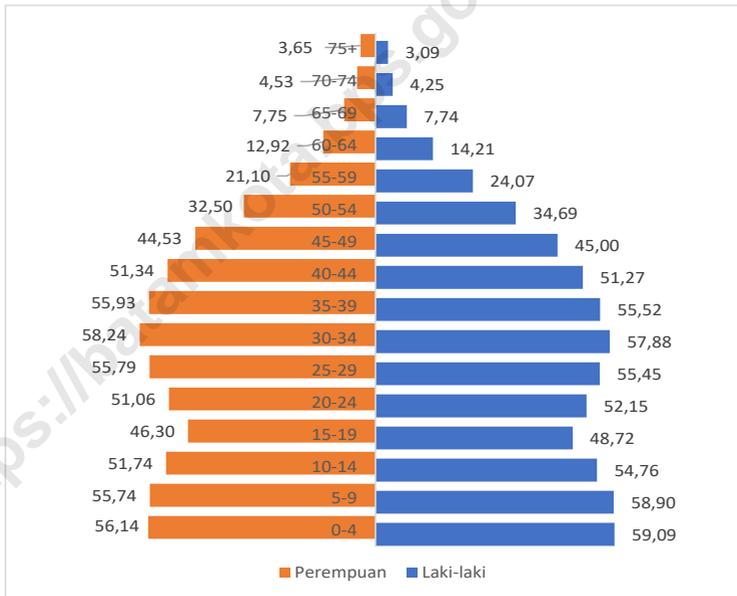
Tabel 5.1
Indikator Kependudukan Kota Batam
Tahun 2022

INDIKATOR	2022	
(1)	(2)	
Penduduk	1.269.413	jiwa
- Laki-laki	646.639	Jiwa
- Perempuan	622.774	jiwa
LPP	3,13	%
Sex Ratio	104	%
Rasio Ketergantungan	41,65	%
- RK Muda	38,77	%
- RK Tua	2,88	%

Sumber : Kota Batam Dalam Angka 2022

Komposisi penduduk menurut jenis kelamin memperlihatkan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Hal ini terlihat dari sex ratio yang nilainya di atas 100, yaitu sebesar 104 persen, yang menjelaskan bahwa dalam setiap 100 orang perempuan, terdapat sekitar 104 orang laki-laki. Lebih banyaknya penduduk laki-laki daripada penduduk perempuan bisa juga menunjukkan bahwa struktur ekonomi Batam lebih cenderung menarik minat pendatang laki-laki, karena Batam memang dikenal sebagai kota industri yang menjadikannya sebagai daerah tujuan migran.

Gambar 5.1
Piramida Penduduk Kota Batam, 2022



Sumber : BPS, Proyeksi Penduduk Hasil Sensus Penduduk 2020

5.2 Perekonomian

Aspek perekonomian dalam komponen IPM, meliputi komponen pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Komponen ini secara signifikan sangat mempengaruhi perkembangan angka IPM. Komponen daya beli juga berkaitan erat dengan tingkat kesejahteraan penduduk karena menyangkut perekonomian penduduk. Maka dari itu, perlu dilihat

perbandingannya dengan kondisi perekonomian secara makro.

5.2.1 Struktur Perekonomian

Perekonomian Kota Batam sangat tergantung pada sektor industri. Sektor industri mempunyai kontribusi lebih dari 50 persen (58,05 persen) terhadap perekonomian Batam. Terhambatnya kegiatan di sektor industri akan memberikan dampak yang sangat luas bagi perekonomian Kota Batam. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Batam harus memperhatikan dengan sangat serius kegiatan sektor ini dengan kebijakan-kebijakan yang mendukung perkembangan kegiatan industri. Perkembangan sektor industri menuntut tersedianya infrastruktur, sehingga hal ini akan mendorong pembangunan sektor konstruksi. Tumbuhnya kedua sektor ini akan berdampak pada tumbuhnya sektor riil seperti sektor perdagangan. Maka dari itu, struktur perekonomian di Batam selanjutnya ditopang oleh sektor konstruksi dan sektor perdagangan, dengan kontribusi masing-masing sebesar 20,23 persen dan 5,88 persen.

<https://batamkota.go.id>

Tabel 5.2
Peranan Sektor-sektor Ekonomi Menurut Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga Berlaku di Kota Batam,
Tahun 2018-2022 (Persen)

Sektor	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pertanian	0,97	0,99	1,02	0,98	0,95
2. Pertambangan & Penggalian	0,06	0,05	0,05	0,06	0,05
3. Industri Pengolahan	53,75	54,13	58,09	58,41	58,05
4. Pengadaan Listrik & Gas	1,59	1,55	1,54	1,50	1,58
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah	0,17	0,16	0,16	0,16	0,15
6. Konstruksi	20,48	20,84	19,91	20,44	20,23
7. Perdagangan	6,69	6,71	5,99	5,87	5,88
8. Transportasi	3,34	2,73	1,47	1,23	1,83
9. Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	2,38	2,45	1,28	1,14	1,56
10. Informasi, Komunikasi	2,3	2,4	2,83	2,87	2,62
11. Jasa Keuangan	3,6	3,54	3,53	3,39	3,39
12. Real Estate	1,32	1,25	1,04	1,02	0,97
13. Jasa Perusahaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Administrasi Pemerintahan	1,18	1,13	1,29	1,23	1,12
15. Jasa Pendidikan	1,02	0,98	0,96	0,88	0,80
16. Jasa Kesehatan	0,71	0,68	0,68	0,69	0,67
17. Jasa Lainnya	0,44	0,42	0,14	0,13	0,14
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kota Batam

Tabel 5.3
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha,
Kota Batam: Tahun 2021-2022 (Juta Rupiah)

Sektor	2021	2022
(1)	(2)	(3)
1. Pertanian	1.695.666,34	1.845.285,61
2. Pertambangan & Penggalian	96.557,88	105.974,55
3. Industri Pengolahan	100.959.586,69	113.105.233,08
4. Pengadaan Listrik & Gas	2.585.102,03	3.074.140,22
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah	271.155,71	284.810,56
6. Konstruksi	35.329.551,06	39.417.214,84
7. Perdagangan	10.143.970,98	11.462.333,60
8. Transportasi	2.132.651,77	3.556.551,75
9. Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	1.972.381,86	3.044.914,43
10. Informasi, Komunikasi	4.952.094,45	5.100.986,96
11. Jasa Keuangan	5.860.440,94	6.605.452,18
12. Real Estate	1.769.486,26	1.897.376,90
13. Jasa Perusahaan	3.681,28	4.367,33
14. Administrasi Pemerintahan	2.126.137,69	2.172.780,71
15. Jasa Pendidikan	1.525.507,97	1.568.201,49
16. Jasa Kesehatan	1.199.834,30	1.312.919,17
17. Jasa Lainnya	220.096,57	277.713,81
Jumlah	172.843.903,78	194.836.257,18

Sumber: BPS Kota Batam

5.2.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tujuan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi yang positif dan berkelanjutan menjadi tanda keberhasilan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi harus selalu dipertahankan dan dijaga dengan kebijakan-kebijakan yang tepat.

Untuk memacu pertumbuhan ekonomi, selayaknya harus selalu memperhatikan sektor-sektor kunci (leading sector) dalam pertumbuhan ekonomi. Leading sektor perekonomian Kota Batam adalah sektor industri, sektor konstruksi, dan sektor perdagangan. Dengan memacu pertumbuhan pada leading sektor tersebut, akan memberikan dampak terhadap pertumbuhan pada sektor ekonomi yang lain.

Nilai PDRB atas dasar harga berlaku Kota Batam pada tahun 2022 sebesar 194,84 triliun, mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2021 yang senilai 172,84 triliun. Sementara itu, PDRB atas harga konstan pada tahun 2022 adalah sebesar Rp 118,66 triliun, di mana pada tahun sebelumnya sebesar Rp 111,07 triliun. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi Kota Batam tahun 2022 sebesar 6,84 persen. Perekonomian Kota Batam tahun 2022 didukung oleh pertumbuhan yang positif dari semua sektor ekonomi yang ada. Sektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi selama 2022 adalah sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, yang tumbuh sebesar 48,78 persen. Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum tumbuh seiring membaiknya kondisi perekonomian pasca pandemi covid yang sempat melanda, dimana sebelumnya sektor itu sempat terpukul dikarenakan adanya social distancing selama pandemi.

Tabel 5.4
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha,
Kota Batam: Tahun 2021-2022 (Juta Rupiah)

Sektor	2021	2022
(1)	(2)	(3)
1. Pertanian	1.107.090,06	1.156.737,11
2. Pertambangan & Penggalian	73.198,29	77.856,94
3. Industri Pengolahan	64.672.842,51	68.824.747,17
4. Pengadaan Listrik & Gas	1.506.714,69	1.745.965,82
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah	210.753,38	219.331,05
6. Konstruksi	21.880.616,26	22.840.393,89
7. Perdagangan	6.219.691,67	6.657.451,97
8. Transportasi	1.276.503,75	1.871.811,37
9. Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	1.423.406,82	2.117.711,13
10. Informasi, Komunikasi	4.306.474,37	4.407.711,55
11. Jasa Keuangan	3.860.473,16	4.042.364,31
12. Real Estate	1.282.122,28	1.342.551,25
13. Jasa Perusahaan	3.082,07	3.481,68
14. Administrasi Pemerintahan	1.306.762,81	1.320.651,26
15. Jasa Pendidikan	915.563,87	920.663,39
16. Jasa Kesehatan	881.287,15	939.464,89
17. Jasa Lainnya	142.371,71	176.313,38
Jumlah	111.068.954,85	118.665.208,17

Sumber: BPS Kota Batam

Tabel 5.5
Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha, (Persen)
Kota Batam: Tahun 2019-2022

Sektor	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pertanian	6,06	-0,47	-0,33	4,48
2. Pertambangan & Penggalian	1,43	-3,64	7,89	6,36
3. Industri Pengolahan	7,00	3,78	5,31	6,42
4. Pengadaan Listrik & Gas	4,23	-2,67	3,43	15,88
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah	7,23	-2,83	3,22	4,07
6. Konstruksi	6,92	-6,98	6,70	4,39
7. Perdagangan	4,49	-14,73	2,41	7,04
8. Transportasi	-17,02	-44,52	-10,48	46,64
9. Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	9,62	-45,49	-6,44	48,78
10. Informasi, Komunikasi	11,97	18,09	9,00	2,35
11. Jasa Keuangan	4,94	-1,18	0,29	4,71
12. Real Estate	2,10	-16,74	3,91	4,71
13. Jasa Perusahaan	-8,74	-43,33	9,66	12,97
14. Administrasi Pemerintahan	1,08	12,23	1,42	1,06
15. Jasa Pendidikan	0,71	-5,96	-4,08	0,56
16. Jasa Kesehatan	2,10	-2,09	7,65	6,60
17. Jasa Lainnya	1,97	-67,98	-6,06	23,84
Jumlah	5,92	-2,55	4,75	6,84

Sumber: BPS Kota Batam

Gambar 5.2
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dan Nasional
Tahun 2018-2022 (Persen)



Sumber: BPS Kota Batam

Secara umum, pertumbuhan ekonomi Kota Batam tumbuh positif, namun pada tahun 2020, perekonomian Kota Batam mengalami kontraksi sebesar 2,55 persen. Hal ini dikarenakan pada tahun 2020 seluruh dunia dilanda pandemi covid yang sangat berdampak pada perekonomian sehingga kontraksi ekonomi tidak hanya terjadi di Kota Batam tetapi di seluruh Indonesia bahkan dunia. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau, pertumbuhan ekonomi Kota Batam selalu berada di atas angka pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau, namun keduanya selalu mempunyai pola yang sama dikarenakan Kota Batam merupakan penyumbang terbesar bagi perekonomian yang ada di Kepulauan Riau.

5.2.3 PDRB per Kapita

PDRB merupakan nilai tambah dari seluruh kegiatan ekonomi yang terjadi di suatu daerah. Nilai tambah tersebut diperoleh dari total output dikurangi dengan biaya antara yang dipakai dalam proses produksi.

PDRB dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun akan menjadi PDRB per kapita, yang dapat diasumsikan sebagai pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita dapat digunakan sebagai pendekatan untuk ukuran tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum.

Tabel 5.6
PDRB Per Kapita Kota Batam
Tahun 2018-2022 (Juta Rupiah)

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB per Kapita (Juta Rp)					
- Harga Berlaku	113,77	115,79	135,40	140,51	153,49
- Harga Konstan	77,25	76,59	88,97	90,29	93,48

Sumber: BPS Kota Batam

Berdasarkan Tabel 5.6, tampak bahwa PDRB per kapita penduduk Kota Batam menurut harga berlaku, menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018, rata-rata penduduk Batam memiliki PDRB per kapita sebesar 113,77 juta rupiah (ADHB) dan 77,25 juta rupiah (ADHK) dalam setahun. Kini, setelah empat tahun berselang, di mana perekonomian tumbuh dan penduduk pun tumbuh, PDRB per kapita menjadi sebesar 153,49 juta rupiah (ADHB) dan 93,48 juta rupiah (ADHK) dalam setahun. Hal ini berarti bahwa tingkat perekonomian mampu lebih cepat pertumbuhannya dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk, sehingga secara makro pemenuhan kebutuhan penduduk masih dapat ditingkatkan.

5.3 Pendidikan

Pendidikan merupakan sarana untuk mencerdaskan bangsa. Oleh sebab itu, berhasil atau tidaknya pembangunan suatu bangsa banyak dipengaruhi oleh tingkat pendidikan penduduknya. Semakin maju tingkat pendidikan, berarti akan membawa pengaruh yang positif bagi masa depan berbagai bidang kehidupan. Secara makro gambaran kemajuan bidang pendidikan tercermin dari Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah yang semakin meningkat, sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya.

Gambaran umum tentang kemajuan pencapaian pendidikan juga tercermin dari pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, angka

partisipasi (sekolah, kasar, dan murni), dan output yang dihasilkannya (pendidikan yang ditamatkan).

5.3.1 Sarana Pendidikan, Guru, dan Murid

Akses terhadap fasilitas pendidikan akan memberikan pengaruh terhadap tingkat partisipasi sekolah di suatu daerah. Maka dari itu, hal ini menjadi salah satu faktor penting yang menunjang kemajuan di bidang pendidikan sehingga perlu kelayakan atas tersedianya sarana ataupun fasilitas pendidikan di masyarakat.

Hingga tahun 2021, jumlah bangunan sekolah di Kota Batam mencapai sebanyak 778 unit, yang terdiri atas 406 unit gedung SD sederajat, 215 unit gedung SLTP sederajat, dan 157 unit gedung SLTA sederajat, baik negeri maupun swasta yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan maupun Kementerian Agama. Keberadaan sejumlah fasilitas pendidikan tersebut ditunjang dengan tenaga pengajar sebanyak 6.774 orang guru SD sederajat, 3.198 orang guru SLTP sederajat, dan 2.890 orang guru SLTA sederajat yang tersebar di seluruh wilayah Kota Batam. Mereka akan mendidik dan membimbing peserta didik yang masing-masing berjumlah 141.992 orang murid SD sederajat, 60.946 orang murid SLTP sederajat, dan 53.958 orang murid SLTA sederajat.

Tabel 5.7
Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid
Menurut Jenis Sekolah, Kota Batam: 2022

Uraian	SD	SLTP	SLTA	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sekolah	405	217	168	790
Guru	6.648	3.152	2.967	12.767
Murid	136.154	60.951	53.320	250.425
Rasio Murid-Guru	20	19	18	20

Sumber: - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Data Semester Ganjil
 - Kementerian Agama, Data Semester Ganjil

Dengan komposisi sebagaimana tersebut di atas, diperoleh rasio murid-guru yang menjelaskan rata-rata jumlah murid yang harus ditangani oleh setiap guru. Secara umum, rasio murid-guru masih berada pada kondisi ideal, yaitu 20. Jika dilihat pada setiap jenjang, rasio murid-guru tingkat SLTP dan SLTA masih berada pada situasi yang cukup ideal, yaitu 18 dan 19. Hal ini berarti setiap guru SLTP secara rata-rata akan menangani sebanyak 19 murid. Sementara itu, setiap guru SLTA secara rata-rata menangani 18 murid. Rasio yang terlalu besar akan menyebabkan kurang efektifnya kegiatan belajar-mengajar di kelas.

5.3.2 Angka Partisipasi

Terdapat beberapa ukuran angka partisipasi yang sering dikenal dalam dunia pendidikan, yaitu Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Masing-masing indikator angka partisipasi tersebut dibedakan menurut kelompok usia sekolah ataupun jenjang pendidikan.

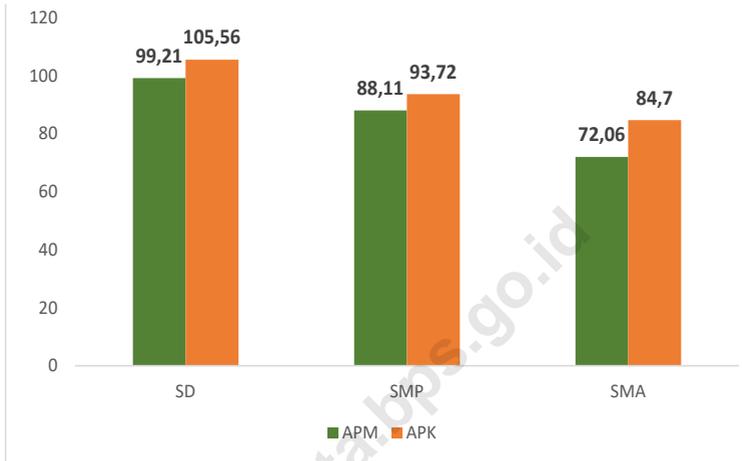
Untuk melihat seberapa banyak jumlah anak-anak yang bersekolah pada jenjang tertentu (tanpa memperhatikan umur) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia sekolah pada jenjang tersebut, indikator yang dapat digunakan adalah Angka Partisipasi Kasar (APK). Adapun untuk melihat seberapa banyak jumlah anak-anak usia sekolah tertentu yang bersekolah pada jenjang tertentu dibandingkan dengan jumlah penduduk usia sekolah pada jenjang tersebut, digunakan Angka Partisipasi Murni (APM).

Berdasarkan data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2022, APM Kota Batam sebesar 99,21 persen untuk jenjang pendidikan SD, hal ini menunjukkan bahwa masih ada sebanyak 0,79 persen anak pada kelompok usia SD yang tidak bersekolah tepat pada waktunya. Sementara untuk APM SMP yaitu sebesar 88,11 persen dan APM SMA 72,06 persen.

Untuk menunjukkan berapa besar umumnya tingkat partisipasi penduduk pada suatu tingkat Pendidikan digunakan APK. APK Kota Batam pada tahun 2022 sebesar 105,56 pada jenjang Pendidikan SD, dan 93,72 persen pada jenjang SMP, serta 84,70 persen pada jenjang SMA. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak murid di Kota Batam yang bersekolah namun tidak sesuai dengan jenjang umurnya.

Gambar 5.3

Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni Menurut Jenjang Pendidikan, Kota Batam 2022



Sumber: BPS Kota Batam, Susenas 2022

5.3.3 Pendidikan yang Ditamatkan

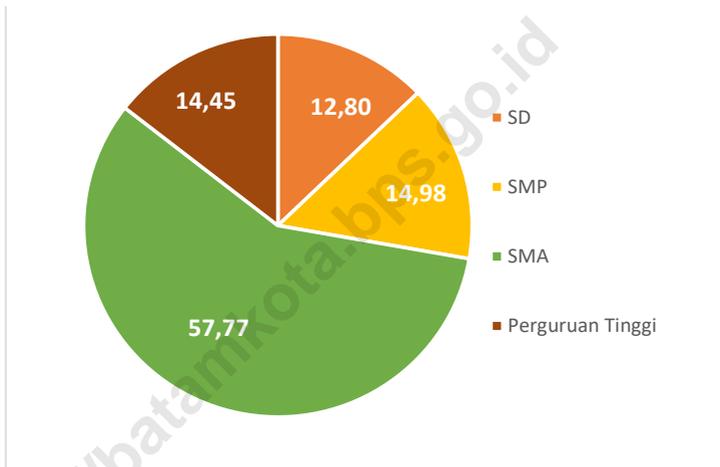
Peningkatan kualitas suatu bangsa sesungguhnya bertumpu pada kualitas sumber daya manusianya, dan hanya akan dapat dicapai salah satunya melalui pendidikan. Ini artinya pendidikan mempunyai kontribusi yang sangat berharga dan signifikan dalam meningkatkan kualitas suatu bangsa. Teori human capital berpendapat bahwa pendidikan adalah sebagai investasi sumber daya manusia yang memberi banyak manfaat, antara lain: diperolehnya kondisi kerja yang lebih baik, efisiensi produksi, peningkatan kesejahteraan dan tambahan pendapatan seseorang apabila mampu menyelesaikan tingkat pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan lulusan pendidikan di bawahnya.

Peningkatan kualitas SDM yang diharapkan tergambar berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi memperluas pengetahuan masyarakat dan mempertinggi rasionalitas pemikiran mereka. Hal ini memungkinkan masyarakat mengambil langkah yang lebih rasional dalam bertindak atau mengambil keputusan. Semakin banyak penduduk yang tamat pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi maka kualitas SDM-nya pun semakin baik. Maka dari itu, persentase penduduk berusia 15 tahun ke atas menurut pendidikan tertinggi yang

ditamatkan menjadi salah satu indikator penting di bidang pendidikan.

Pada tahun 2022, mayoritas penduduk Batam yang berusia 15 tahun ke atas adalah tamatan SMA sederajat, yaitu sebesar 57,77 persen. Sementara itu, penduduk berusia 15 tahun keatas yang menamatkan pendidikan tinggi hanya ada sebesar 14,45 persen.

Gambar 5.4
Distribusi Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas
Menurut Pendidikan yang Ditamatkan, Kota Batam: 2022 (Persen)



Sumber: BPS Kota Batam, Susenas 2022

5.4 Kesehatan

Pembangunan bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, merata, dan murah. Dengan tujuan tersebut diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang baik, yang pada gilirannya memperoleh kehidupan yang sehat dan produktif. Terkait hal ini, isu yang diangkat oleh pemerintah dalam RPJMN antara lain peningkatan kesehatan ibu, anak, remaja, dan lansia; percepatan perbaikan gizi masyarakat; pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan; peningkatan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas; pemenuhan ketersediaan farmasi, alat kesehatan, dan pengawasan obat dan makanan; pemenuhan SDM kesehatan; peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat; dan lain lain.

Dapat disimpulkan bahwa upaya pencapaian derajat kesehatan tercermin dari ketersediaan sarana dan parasarana kesehatan serta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Apabila isu ini dapat ditanggulangi dengan baik oleh pemerintah, tentu derajat kesehatan masyarakat akan meningkat. Pada gilirannya, peningkatan kesehatan masyarakat akan berdampak terhadap peningkatan pembangunan manusia. Peningkatan derajat kesehatan juga tercermin dalam IPM melalui komponen Indeks Harapan Hidup yang semakin meningkat.

5.4.1 Sarana Kesehatan

Upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat terus dilakukan oleh pemerintah, salah satunya dengan menambah jumlah sarana kesehatan. Bertambahnya sarana kesehatan tersebut diharapkan dapat mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang diperlukan. Sarana kesehatan yang dimaksud adalah rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, klinik. Selain itu, pemenuhan ketersediaan farmasi seperti apotek dan toko obat juga turut mendukung terciptanya pembangunan kesehatan di masyarakat.

Berdasarkan Tabel 5.8, secara umum jumlah sarana kesehatan tidak mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini dapat terlihat dari jumlah fasilitas rumah sakit, puskesmas, dan poliklinik yang tetap.

Tabel 5.8
Banyaknya Sarana Kesehatan Menurut Jenisnya
di Kota Batam Tahun 2021 dan 2022

Sarana Kesehatan	2021	2022
(1)	(2)	(3)
1. Rumah Sakit	12	12
2. Puskesmas	19	19
3. Poliklinik	38	38
J U M L A H	69	69

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Batam

5.5 Ketenagakerjaan

Transisi demografi telah menyebabkan komposisi penduduk usia produktif meningkat lebih cepat daripada pertumbuhan penduduk secara keseluruhan, sehingga penduduk usia kerja (usia 15 tahun ke atas) cenderung meningkat dan semakin besar jumlahnya. Melalui Survei Angkatan Kerja Nasional tahun 2021 tercatat bahwa jumlah penduduk usia kerja di Kota Batam ada sebanyak 1.140.614 orang. Penduduk usia kerja yang semakin bertambah tidak seluruhnya masuk sebagai angkatan kerja, sebagian ada yang terkategori sebagai bukan angkatan kerja yaitu penduduk yang masih/sedang bersekolah dan/atau mengurus rumah tangga. Di antara penduduk usia kerja, terdapat sebanyak 330.037 orang bukan angkatan kerja dan 810.577 lainnya masuk dalam angkatan kerja.

Tabel 5.9
PDRB Per Kapita Kota Batam
Tahun 2021-2022 (Juta Rupiah)

Indikator	2021	2022
(1)	(2)	(3)
Penduduk Usia Kerja	1.140.614	1.191.281
Angkatan Kerja	810.577	848.628
- Bekerja	716.193	767.507
- Pengangguran	94.384	81.121
Bukan Angkatan Kerja	330.037	342.653
TPAK	71,06	71,24
TPT	11,64	9,56

Sumber: BPS Kota Batam

Pada tabel 5.9 terlihat bahwa jumlah angkatan kerja meningkat dibanding tahun 2021. Hal itu mengakibatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga naik 0,18 poin menjadi 71,24 persen. Lebih jauh lagi, angkatan kerja yang aktif bekerja pada tahun 2022 ada sebanyak 767.507 orang, naik sebanyak 6,33 persen dari tahun 2021. Bersamaan dengan itu, angkatan kerja yang menganggur mengalami penurunan di tahun 2022, yakni sebesar 14,05 persen menjadi 81.121 orang. Selain jumlah pengangguran pada tahun 2022 yang mengalami penurunan, disamping itu TPT Kota Batam juga mengalami penurunan

sebesar 2,08 poin.

Dari seluruh penduduk yang bekerja, mayoritas terserap di sektor jasa-jasa yaitu mencapai 56,43 persen. Selain itu, sektor manufaktur juga banyak menyerap tenaga kerja yaitu sebesar 40,55 persen. Hal ini menunjukkan bahwa hampir setengah dari lapangan usaha di Kota Batam bergerak pada sektor jasa-jasa. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar 5.5.

Gambar 5.5
Persentase Penduduk yang Bekerja
Menurut Lapangan Usaha di Kota Batam, Tahun 2022



Sumber: BPS Kota Batam, Sakernas 2022

ST 2023
SENSUS PERTANIAN

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<https://batamkota.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA BATAM**

Jl. Raja Ali Kelana, Batam Kota, 29464
Telp. (0778) 7433299, Fax: (0778) 7433299
Homepage: batamkota.bps.go.id E-mail: bps2171@bps.go.id

ISSN 2798-3366

